

## **BAB II KONDISI UMUM**

Pembangunan di Nusa Tenggara Timur yang telah dilaksanakan sampai saat ini bersifat multi-bidang mencakup bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparaturnya Negara, pengembangan wilayah dan tata ruang, sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan di maksud telah menghasilkan berbagai sukses dan telah dipergunakan untuk meningkatkan perkembangan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Selain sukses dimaksud, pembangunan di masa lampau masih berhadapan dengan dan menyisakan berbagai rintangan, tantangan dan masalah berkelanjutan yang tetap menjadi beban pembangunan daerah Hampir tiada pembangunan yang steril terhadap kegagalan dan tidak ada strategi pembangunan yang tidak beresiko, karena resiko dan kegagalan menjadi bagian integral dari satu strategi.

Berdasarkan keperiadaan dan keadaan dimaksud maka pembangunan daerah tidak mungkin ditunda, dihentikan, apalagi ditiadakan. Amanat ini mengharuskan kita untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nusa Tenggara Timur 2007-2026.

### **2.1 PERKEMBANGAN TERKINI PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA TIMUR**

#### **A. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama**

1. Kualitas kehidupan manusia sebagai kontrak yang didummy oleh kualitas kesejahteraan dan kemakmuran secara teoritikal dan faktual antara lain diterangkan oleh keberhasilan pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama. Prinsip pembangunan manusia seumur hidup (*life long human development*) dan belajar sepanjang hayat (*life long education*) adalah prinsip pembangunan bidang ini yang diaktualisasikan melalui aspek demografi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

## 2. Demografi

- 2.1 Jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan daerah dan nasional, akan tetapi apabila penduduk sebagai sumberdaya manusia berkualitas rendah maka penduduk lebih diposisikan sebagai beban pembangunan karena perannya sebagai konsumen, bukan produsen pembangunan. Gejala dan sistem permasalahan demografis nasional dan daerah diterangkan oleh sinergi faktor kekuatan perubahan dan resistensi internal daerah, nasional dan faktor perubahan demografi global.
- 2.2. Secara internal, tingkat morbiditas yang masih tinggi diproksikan oleh 5 keluhan kesehatan sebulan lalu sebagai penjabar utama selama rentang 1998-2005 yaitu batuk (33,37%), Pilek (31,22%), panas (27,29%), 13,50%), dan diare (4,86%) dan dua penyakit utama berdasarkan SKRT yaitu ISPA, Diare telah berkontribusi dan menerangkan tingkat mortalitas yang masih tinggi. Baik IMR 2005 (48,98), ASDR 2004 (0,96-173,09) dan CDR 2004 (5,63).
- 2.3. Fenomena morbiditas dan mortalitas tersebut menjelaskan rate fertilitas baik Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) 2005 terutama pada rentang usia ibu 20-24 sampai 35-39 (619 = 88,68%) dan Angka Kelahiran Total (TFR) 2005 (3,49) dan Angka Kelahiran Kasar (CBR) 2005 (28,88). Fenomena demografis ini tidak termasuk migrasi telah berkontribusi Pertumbuhan Penduduk 2000-2004 (2,10%) atau > 0,51% dari pertumbuhan penduduk 1999-2000 (1,59). Apabila tidak dikendalikan pertumbuhan penduduk wilayah ini melalui strategi yang tepat maka pertumbuhan linear berdasarkan data 2005 akan menghasilkan penduduk NTT 2020 sebesar 7.020.375 jiwa.
- 2.4. Angka harapan hidup penduduk berusia 0 tahun di kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur (63,0) lebih rendah dari nasional (65,4) SP 2000. Angka harapan hidup penduduk Nusa Tenggara Timur sangat rendah perubahan meningkatnya (7,51%) dibanding nasional (9,36%) selama dasawarsa 1986-1996.

- 2.5. Kecenderungan global di bidang demografi dengan faktor migrasi internasional yang membawa serta IPTEKS modern ke semua ruang telah melanda daerah ini dan berdampak secara signifikan terhadap reaktualisasi pandangan hidup yang memungkinkan berlangsungnya transformasi budaya dan fungsional. Transformasi fungsional memungkinkan sesuatu yang semula dianggap tidak mungkin, terutama dalam penciptaan pekerjaan dan jabatan baru termasuk efisiensi yang terus-menerus meningkat.
- 2.6. Kecenderungan demografis tersebut di atas berdampak pada reartikulasi ruang hidup yang semula seluas ruang domisili, diperluas menjadi ruang ekonomi/nafkah baru karena dampak teknologi kibernetik (*cybernetic*) yang membentuk ruang nafkah maya..
- 2.7. Migrasi geografis penduduk akan berdampak pada perubahan sistem matapencaharian, perubahan fungsi ruang-lahan dan membidani ancaman sektor pembangunan lain seperti pertanian, padahal justru sektor pertanian ber kontribusi dominan dalam struktur perekonomian daerah. Mengam strategi pembangunan daerah sedang berupaya untuk mengembangkan pembangunan industri untuk mengganti posisi sektor ekonomi dalam pembentukan struktur perekonomian daerah, namun perlu ditemukan ancangan terpadu untuk mengintegrasikan semua permasalahan dalam kerangka menghasilkan nilai tambah bagi perubahan.
- 2.8. Migrasi neto seumur hidup 1980-2000 bersifat minus dengan kecenderungan meningkat yaitu 1980 (-0,46%) menjadi 2000 (-1,69%) dengan total kenaikan (-1.23%) dan rerata 0,061/thn. Migrasi Neto recent pada rentang tersebut juga menunjukkan peningkatan total 1,49% dengan rerata 0,074%. Dengan demikian pertumbuhan penduduk lebih dideterminasi oleh tingkat kelahiran.

### **3. Sumberdaya Manusia**

- 3.1. Sumberdaya manusia memiliki potensi (*human resources capital*) yang merupakan faktor terdepan dan utama dalam pembangunan daerah. Modal sumberdaya manusia antara lain dalam bentuk kualitas perilaku baik pengetahuan, keterampilan

dan sikap profesionalisme dan kompetensi yang terbentuk melalui pendidikan, kualitas kesehatan pribadi juga menjadi modal sumberdaya manusia. Modal sumberdaya manusia mengandung energi yang dapat disinergikan dengan modal sosial, ekonomi dan lingkungan akan menghasilkan pembangunan yang lebih bermakna.

3.2. Kualitas sumberdaya manusia Nusa Tenggara Timur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tahun 2002 sebesar 60,3 dan 2005 sebesar 63,3, dengan rerata pertumbuhan 1,1/tahun. Berdasarkan peringkat nasional, Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Timur berada pada peringkat 31. Ragaan tersebut di atas menyimpulkan IPM NTT tergolong rendah.

3.3. Indikan-indikan IPM sumberdaya manusia juga masih harus ditingkatkan secara terus-menerus terutama yang berkaitan dengan pendidikan baik menyangkut kualitas pembelajaran dan hasil belajar, daya saing lulusan dan relevansi, pemerataan, sediaan sarana dan prasarana pendidikan terutama di pendidikan dasar-menengah.

#### **4. Pendidikan**

4.1. Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur bekarakter majemuk mencakup ekonomi, struktural, situasional/alamiah, sosial, politik dan subyektif, menjadi salah satu faktor dominan yang memperburuk atau setidaknya menginvolusi kualitas pendidikan dan menyebabkan rendahnya mutu SDM berindikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pilihan strategi solusi yang kurang strategis dapat mendegradasikan mutu pendidikan wilayah ini di kemudian hari.

4.2. Harapan Hidup penduduk Nusa Tenggara Timur tahun 2005 hanya 65,1 tahun.. Kurva pertumbuhan IPM dan harapan hidup masih bersifat flat dan apabila strategi dan perlakuan -artifisial-pembangunan tidak tepat maka IPM NTT tetap rendah. Untuk itu perlu ditingkatkan dan dipercepat pertumbuhan kedua faktor tersebut.

- 4.3. Berdasarkan komposisi demografis Nusa Tenggara Timur, titik berat penduduk berada pada usia muda dan sebagian diantaranya merupakan penduduk usia sekolah. Penduduk usia 15-44 tahun berstatus buta aksara masih tinggi (370.710 jiwa). Besaran tersebut menempatkan provinsi NTT dalam kelompok 9 provinsi berpenduduk buta aksara tertinggi di Indonesia. Kecenderungan menunjukkan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi ke depan akan tetap menghasilkan komposisi demografis serupa sekarang.
- 4.4. Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar tahun 2005 masih rendah (SD = 88,07, SMTP 36,67, SMTA 25,42). Angka tersebut masih lebih rendah secara signifikan terhadap APM Nasional 12,8% (2004). Besaran angka proyeksi linear APM Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 baru akan mencapai SD 92,34, SMTP 63,06 dan SMTA 48,33. APM NTT tersebut di atas tergolong rendah secara nasional, dan fenomena ini secara fungsi akan mewariskan kualitas pendidikan-SDM yang tidak berkemampuan memproaksi kecepatan perubahan kebutuhan pembangunan ke depan.
- 4.5. Penduduk NTT usia 10-14 tahun sebanyak 481.500 jiwa (11,3%) dari total penduduk (SUPAS,2005), dan 2,25% anak berstatus tidak/belum bersekolah, 88,15% darinya anak sedang bersekolah dan 9,60% anak tidak bersekolah lagi. Atau 11,85% anak tidak/belum bersekolah dan tidak bersekolah lagi. Sebanyak 85,39% dari total anak usia 10-14 tahun bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 78,96% anak bekerja tidak dibayar karena berstatus pekerja asal keluarga. Data SUSENAS (2005) menunjukkan terdapat 23.105 anak usia <15 tahun yang sedang bekerja
- 4.6. Data nasional menunjukkan rasio Research and Development (R&D)/juta penduduk hanya sebesar 1 (1985/1995) dan jumlah paten yang dihasilkan hanya 20 paten (1996), tanpa jumlah ekspor teknologi tinggi/manufaktur (1997). Indonesia ber Nilai Daya Saing Bangsa 13,3 dari nilai maksimum 100 atau berperingkat 28 dan ber Nilai Kontribusi IPTEK dan SDM terhadap dunia usaha sebesar 9,6 atau berperingkat 30 dari 30 negara. Daya saing penduduk Nusa Tenggara Timur

berdasarkan indikan tersebut diasumsi lebih rendah dari daya saing penduduk secara nasional.

- 4.7. Mutu lulusan SMU/SMK NTT bidang IPA dan IPS berdasarkan indikan skor UMPTN/SPMB selama rentang 1994-2005 sangat rendah secara nasional dan berposisi pada kuartil terbawah peringkat nilai nasional menurut provinsi. Posisi mutu lulusan tersebut menjadi salah satu indikan rendahnya daya saing nasional lulusan SMU dan SMK wilayah ini. Dampaknya adalah lulusan di wilayah ini berkementakan bersaing di wilayah mutu perifer kecuali sangat sedikit lulusan bermutu yang bereksodus ke sentrum persaingan nasional dan regional.
- 4.8. Kecenderungan global bidang perdagangan dan demografi dalam waktu dekat mendatang akan menghadirkan jasa dan manajemen pendidikan bermutu luar negeri di Nusa Tenggara Timur. Persaingan komoditi bermutu saing di pasar global tidak terhindarkan karena itu mutu manajemen pendidikan dan keluaran pendidikan NTT yang kini hanya diserap oleh kebutuhan pasar lokal perlu dibenahi untuk masuk ke pasar global.
- 4.9. Kualitas mutu keluaran pendidikan pada semua aras terutama pendidikan tinggi mengalami krisis kualitas. Krisis ini disebabkan oleh menjamurnya penjualan gelar dan penyelenggaraan pendidikan dalam ragam pendidikan jarak jauh, kelas parallel, kelas akhir minggu, kelas eksekutif dan lainnya, yang tidak memenuhi kaidah dan norma akademik.
- 4.10. Kualitas SDM berindikan status pendidikan masih rendah. Populasi penduduk berstatus pendidikan tidak/belum pernah bersekolah cukup besar 352.936 jiwa (11,19%) dan yang tidak/belum tamat SD/MI 1.002.828 jiwa (31,8%) atau sebanyak 42,99% penduduk yang tidak/belum bersekolah/belum tamat SD/MI. Besaran relative kumulatif penduduk berstatus pendidikan setinggi lebih rendah tamat SD/MI 76,32%, SMTP 87,17% dan setinggi lebih rendah tamat SMTA 97,48%.

## 5. Kesehatan

5.1. Angka morbiditas Nusa Tenggara Timur menunjukkan tingginya angka ini berdampak lanjut pada tingginya angka mortalitas = 5,63/1000 penduduk (2004). Angka Kematian Bayi = 49/1000 (2004) kelahiran hidup tergolong tinggi. Angka balita berstatus gizi sedang = 28,65% (2002) dan gizi kurang/buruk = 15,68%, tergolong tinggi.

5.2 Data SKRT menunjukkan jenis penyakit yang paling menerangkan angka morbiditas yaitu ISPA dan diare secara tidak langsung berkaitan dengan peran ibu dan kualitas kesehatan lingkungan yang masih buruk.

## 6. Sumberdaya Perempuan

Hasil analisis situasi perempuan Nusa Tenggara Timur menunjukkan mitos status superordinasi perempuan berbanding terbalik dengan fakta status dan peran perempuan di segala bidang. Penduduk perempuan masih termarginalkan oleh status superordinasi laki-laki. Pembangunan yang bersifat spesifik perempuan juga yang bersifat neutral gender pun belum berpihak pada kepentingan perempuan bahkan golongan ini belum diakui sebagai pekerja sektor kerumahtanggaan sekalipun curahan waktu dan tenaga kerjanya melampaui laki-laki. Mereka hanya distatuskan sebagai penerima pendapatan suami yang berasal dari sektor nafkah, hanya karena nilai kerja perempuan non karier tidak bernilai ekonomi.

Kekerasan terhadap wanita, anak dan kekerasan dalam rumah tangga masih berlangsung secara intens. Perempuan belum menemukan jati dirinya dan belum cukup berkemampuan mengaktualisasikan diri dalam pembangunan daerah.

Preferensi anak lelaki masih menjadi faktor kendala bagi wanita dalam pengambilan keputusan adopsi inovasi keluarga berencana.

## 7. Pembangunan Budaya

7.1. Kecenderungan global di bidang telekomunikasi dan informasi telah menghasilkan tekanan arus Gelombang III dan telah berdampak secara luas terhadap proses akulturasi, ankulturasi, asimilasi dan asosiasi antar nilai dan norma budaya di Nusa

Tenggara Timur. Anggota masyarakat sebagai aktor budaya terdorong memiliki identitas "budaya global" dan mengalami pereduksian bahkan alienasi budaya lokal dan berdampak pada krisis nasionalisme dan jatidiri bangsa, sehingga pelaku budaya teralienasi dalam ruang budayanya (*culture sphere*).

- 7.2. Benturan antar etnis/sub etnis berlangsung dalam wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemajemukan sebagai kekuatan perubahan progresif secara keliru telah dipersepsi dan diperdayagunakan (*empowering*) sebagai alat kekuasaan dan pemupuk fanatisme kelompok. Benturan dan friksi antar kelompok sangat mencoraki masyarakat majemuk Nusa Tenggara Timur.
- 7.3. Nilai dan norma kultural (*culture system*) yang semula di gunakan sebagai rujukan interaksi sosial yang terinstitusio-nalisasi dan terkarakterisasi dalam pranata sosial lokal mengalami degradasi. Keluarga inti klasik berubah menjadi keluarga inti modern, nilai cinta kasih perkawinan tergusur oleh nilai kontrak, fungsi proteksi dan afeksi keluarga diganti oleh peran lembaga formal luar keluarga, kearifan lokal pendistribusi kesejahteraan masyarakat miskin perdesaan di ambil alih oleh hukum ekonomi dan teknologi robotik.
- 7.4. Setiap sistem sosial tidak bebas dari benturan. Benturan merupakan bagian integral keberadaan semua sistem sosial. Benturan tidak dihindari tetapi harus dikelola melalui manajemen keseimbangan agar memberikan motivasi persaingan yang sehat untuk berkembang. Intensitas konflik dan friksi berlatar suku, agama dan golongan berlangsung dalam wilayah ini. Komunalisme, daya empati sosial, solidaritas mekanistik, toleransi sosial bertentangan terbuka dengan individualisme dan kepentingan kelompok selain karena anomie.
- 7.5. Kerukunan hidup antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur tergolong kondusif dalam rentang sepuluh tahun terakhir. Tantangan pembangunan aspek agama di wilayah ini adalah buruknya rasio saramna dan prasarana peribadatan terhadap jumlah penduduk menurut golongan agama, ketimpangan rasio guru agama : murid terutama pada kelompok guru agama Katolik dan Protestan.



7.6. Masalah urgen dan aktual aspek ini adalah rendahnya kualitas pengejawantahan nilai-nilai dan etika religius dalam tampilan perilaku umat di berbagai aspek kehidupan baik pemerintahan, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

## **B. Bidang Ekonomi**

1. Dinamika perekonomian di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilepaskan dari dinamika perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia dimana transaksi-transaksi ekonomi telah menjadi tanpa batas. Falsafah Indonesia yang bebas aktif dalam pergaulan dunia, serta pergeseran tata pemerintahan Indonesia kepada kondisi yang lebih demokratis telah memungkinkan Indonesia menjadi negara yang makin terbuka dalam melakukan transaksi ekonomi.
2. Sepanjang tahun 1990 sampai 2006, telah terjadi berbagai kejadian penting di berbagai belahan dunia yang telah dan berpotensi mempengaruhi kinerja perekonomian Nusa Tenggara Timur di antaranya adalah:
  - a. Perang Teluk, Perang Afghanistan dan Perang Irak secara khusus telah menimbulkan krisis minyak dunia yang ditandai oleh variasi harga minyak yang tinggi. Bagi Indonesia, hal ini berdampak buruk karena pada dasawarsa terakhir Indonesia telah menjadi pengimpor netto minyak bumi. Dampaknya bagi Nusa Tenggara Timur berjalan linear dengan dampak terhadap Indonesia, karena NTT merupakan konsumen murni minyak bumi.
  - b. Terjadi krisis moneter hebat Indonesia yang disertai oleh pergantian rejim pemerintahan. Nusa Tenggara Timur bereaksi dengan mengalami pertumbuhan ekonomi yang terus berada di bawah tingkat inflasi, dan sampai tahun 2005 belum mengalami reversal pertumbuhan ekonomi seperti sebelum tahun 1997.
  - c. Timor Timur dinyatakan sebagai negara independen Timor Leste di bawah referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi Nusa Tenggara Timur, Masalah dan peluang datang bersamaan berdirinya Timor Leste bagaimana mengambil manfaat dari kesempatan perdagangan dengan Timor Leste sembari menyelesaikan permasalahan pengungsi Timor Timur.

- d. Kebijakan Otonomi Daerah yang mendelegasikan kewenangan pusat kepada propinsi, salah satunya dalam penggunaan anggaran pembangunan.
  - e. Disepakatinya Tujuan Pembangunan Milenium 2015 secara universal untuk mereduksi setengah porsi kemiskinan \$2/hari pada periode 1990-2015.
  - f. Meningkatkan produktifitas usahatani pangan dan hortikultural di Amerika Serikat, Thailand dan Vietnam secara khusus telah mengakibatkan ekspansi perdagangan beras, buah, daging ayam dan hasil olahan pangan ke Indonesia, tidak terkecuali kepada konsumen di Nusa Tenggara Timur.
  - g. Revitalisasi Pertanian dinyatakan sebagai salah satu program utama Pemerintah Republik Indonesia
3. Selama kurun waktu 1993-2004 pertumbuhan ekonomi NTT mencapai rata-rata 5.39 persen per tahun (1993: 9,54%pa; 2004: 5,58%pa), namun demikian sejak tahun 1997, pertumbuhan ekonomi tersebut kalah pacu dengan inflasi. Kejutan inflasi yang terjadi pada tahun 1997-1999 yang belum diredam oleh lonjakan pertumbuhan ekonomi secara dinamis mengindikasikan rendahnya daya beli relatif rerata masyarakat tahun 2000-2004 dibandingkan tahun 1993-1996.
  4. Dalam dua tahun terakhir (2004 dan 2005), suku bunga riil menjadi negatif seperti kondisi tahun 1998, sehingga menghambat ekspansi perekonomian. Kondisi NTT yang terpencar menyulitkan formulasi biaya transportasi murah, namun demikian tetap diperlukan diperlukan upaya menurunkan inflasi dari dua digit menjadi satu digit dengan suku bunga riil positif sehingga perekonomian dapat ekspansif.
  5. Kesejahteraan penduduk yang diindikasikan oleh pendapatan per kapita penduduk NTT terus mengalami peningkatan dari Rp579.9 ribu pada Tahun 1993 menjadi Rp2,938.2 ribu pada tahun 2004. Dalam kondisi demikian diperkirakan terdapat 27.86% penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur (Tahun 2004), yakni mereka yang pengeluaran per bulannya kurang dari Rp143455/bulan di perkotaan, dan kurang dari Rp108725 di pedesaan. Kecenderungan melebarinya senjang pendapatan akan berdampak pada rendahnya konsumsi bergisi dan investasi pendidikan dan

produksi pada kelompok masyarakat miskin sehingga sulit keluar dari kemiskinan menjadi sistemik.

6. Pola distribusi pendapatan tersebut dipicu oleh perbedaan upah antar klasifikasi tenaga kerja dan perbedaan pendapatan rumah tangga per lokasi (rural/urban) per kepemilikan usaha. Proporsi terbesar pekerja NTT berada pada klasifikasi (1) Pertanian bukan penerima upah dan gaji, dan (2) Pertanian penerima upah dan gaji. Menurut kompilasi BPS, kedua klasifikasi tenaga kerja tersebut berada pada 3 kelompok penerima upah terbawah.
7. Berdasarkan jenis rumahtangganya, rumahtangga buruh tani, rumahtangga petani berkepemilikan lahan <0.5 ha, dan rumahtangga petani berkepemilikan lahan 0.5-1 ha merupakan tiga dari empat jenis rumah tangga berpenghasilan terbawah. Jadi, selain kebijakan (pendidikan, iptek dan kapitalisasi) juga perlu diintrodusir kebijakan yang memungkinkan kepemilikan lahan di atas 1 hektar per rumah tangga. Kebijakan ini terutama krusial dalam pembangunan di daerah Sumba dimana budaya penghambaan melemahkan kemerdekaan kepemilikan aset.
8. Rerata tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur dalam 4 tahun terakhir (2002-2005) adalah 5,09 persen per tahun, dengan kecenderungan meningkat selama tahun 2004 dan 2005. Menurut kompilasi BPS, rerata elastisitas kesempatan kerja di Nusa Tenggara Timur tahun 2003-2005 adalah 0,292 dimana setiap peningkatan 1 persen PDRB telah menciptakan 0.292 persen peningkatan kesempatan kerja. Pada level nasional, elastisitas kesempatan kerja adalah 0,22, dengan sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar negatif 0,01, sektor industri negatif 0,24 dan sektor jasa-jasa positif 0,54; dan karenanya padu padan kualitas kapital dan kualitas tenaga kerja pada sektor pertanian dan industri perlu diperselaraskan.
9. Berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto, perekonomian Nusa Tenggara Timur didominasi oleh subsektor pertanian (42,16%), kemudian oleh subsektor jasa-jasa (18,97), dan kemudian oleh subsektor perdagangan (15,22%). Pemerintah mencanangkan pengurangan sebagian dominasi subsektor pertanian ke sektor industri, namun demikian dinamika pembangunan belum

memperlihatkan pergeseran arah perubahan mendasar ke arah tersebut. Untuk itu, integrasi spiralis sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier perlu menjadi strategi pembangunan ekonomi.

10. Usahatani tanaman pangan dan hortikultura didominasi oleh kebijakan perberasan yang berlaku secara nasional. Kondisi semiarid Nusa Tenggara Timur seharusnya tidak mengadopsi kebijakan swasembada beras nasional kecuali untuk wilayah beririgasi teknis/semiteknis yang memadai. Menurut catatan BPS, Provinsi NTT merupakan salah satu sasaran beras impor dari Vietnam, maupun beras antar pulau dari Jawa dan Sulawesi.
11. Pada subsektor perkebunan, tanaman lontar (*Borassus sundaicus*) sangat berpotensi dikembangkan bagi produksi gula semut, gula lempeng dan gula air. Pada kurun waktu 1994-2005, belum ada kebijakan ekspansif yang menghadirkan perkebunan lontar di Nusa Tenggara Timur, padahal lontar merupakan tanaman lahan kering adaptif yang produksinya berpotensi meningkatkan ketersediaan gula di Nusa Tenggara Timur.
12. Pada subsektor kehutanan, menurut catatan sejarah, Pulau Sumba dan Pulau Timor merupakan dua dari sedikit daerah penghasil kayu cendana (*Santalum album*) di dunia, dan perdagangan kayu cendana di Sumba dan Timor telah berlangsung jauh sebelum jaman penjajahan Belanda. Namun demikian, sejak tahun 1986 pemerintah menetapkan kebijakan kuota dan harga yang tidak favorable bagi sisi suplai cendana sehingga upaya pengembangan pencendanaan di Nusa Tenggara Timur mandek. Sekalipun kebijakan pembatasan kuota produksi tersebut dicabut pada tahun 2001, belum terjadi peningkatan produksi cendana di Nusa Tenggara Timur. Pun, pengembangan cendana masih bertumpu pada *Santalum album*, padahal sedikitnya ada lima spesies cendana di dunia, khususnya yang dikembangkan India dan Australia.
13. Masih pada subsektor kehutanan, Nusa Tenggara Timur merupakan pensuplai 80 - 90 persen asam nasional, dimana tanaman asam Jawa (*Tamarindus indica*) tersebut tumbuhkembang di Timor dan Alor. Dengan demikian kebijakan terkait pemeliharaan hutan asam perlu dipertahankan, dan pengembangan industri terkait perlu diupayakan.

14. Pada sub sektor peternakan, Nusa Tenggara Timur juga dikenal kaya akan rusa, salah satu plasmanutfah yang dilindungi oleh pemerintah dalam eksplifikasi peternakan. Rusa (dulunya) banyak terdapat di Alor, Sumba dan Timor, dan sudah diwacanakan (terutama di Alor) untuk menjadi komoditas ekonomi yang unik, baik diperdagangkan hidup maupun dalam bentuk olahan karkasnya. Ternak lain yang berpotensi karena langka adalah kuda Sumba, kerbau, sapi Timor dan sapi ongole. Akan tetapi sepanjang tahun 1994-2005, baru ternak sapi yang tersentuh oleh kebijakan ekspansif pemerintah maupun kebijakan pengembangan IPTEK pada institusi riset, padahal kuda Sumba, kerbau dan rusa juga berpotensi menjadi sumber protein hewani yang handal dalam menunjang peningkatan perdagangan antarpulau.
15. Pada subsektor perikanan, kondisi geografis Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan belum terefleksi dalam porsi pendanaan maupun dalam kontribusi subsektor perikanan dalam pembentukan PDRB.
16. Pada sektor pertambangan, terdapat komoditas berkelangkaan tinggi seperti marmer (di Timor) dan panas bumi (di daerah vulkanik Flores). Namun demikian, sampai tahun 2006 perkembangan pertambangan tersebut belum memasuki tahapan akselerasi pertumbuhan.
17. Nusa Tenggara Timur memiliki pulau-pulau kecil yang berpotensi menjadi pulau tetirahan eksklusif sehingga berpotensi memperkuat sektor pariwisata. Selain pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar (Flores, Sumba, Timor dan Alor) memiliki bauran budaya dan alam yang eksotik. Namun demikian, maraknya pariwisata perlu ditopang oleh kewaspadaan terhadap perdagangan internasional narkoba yang mungkin menyusup melalui aktivitas pariwisata di perbatasan Indonesia.
18. Jika kinerja sisi penawaran daripada sektor primer dan sektor sekunder membaik maka arus perdagangan yang telah marak berlangsung akan makin dinamis dengan bersaingnya produk asal Nusa Tenggara Timur pada pasar lokal, nasional maupun internasional. Dengan demikian peluang melakukan reversal terhadap defisit neraca perdagangan selama 1994-2005 akan sangat besar.

19. Pembiayaan pembangunan Nusa Tenggara Timur meningkat seiring bergulirnya otonomi daerah yang makin luas di Indonesia. Peningkatan dana pembangunan pada Pemda Kabupaten/ Kota bukan karena perubahan signifikan Pendapatan Asli Daerah, melainkan karena kebijakan pemerintah pusat semata-mata dalam menyediakan dana pembangunan bagi Pemda Kabupaten/Kota.
20. Peningkatan nilai dana belum diikuti oleh perubahan bauran anggaran (*budget mix*), hal mana ditunjukkan oleh tidak signifikannya perubahan proporsi antar sektor/subsektor selama periode 1996/1997-2003. Proporsi terbesar dana pembangunan tersebut adalah (1) transportasi, meteorologi dan geofisika (29,46%); (2) Pendidikan (10,65%), (3) Aparatur dan Pengawasan (10,46%), (4) Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (9,98%), dan (5) Pertanian (7,11%); sementara itu bidang IPTEK sebagai salah satu ujung tombak kemajuan hanya memperoleh proporsi dana 1,1%, menempati urutan ke-12 dari 21 sektor/aspek kategori pendanaan.
21. Menurut analisis input-output tahun 2001, jika dianggap bahwa asumsi homogenitas, proporsionalitas dan aditivitas dipenuhi, maka investasi pada industri manakan, minuman dan tembakau serta listrik, gas dan air minum serta hotel dan restoran memiliki daya dorong yang tinggi dengan kepekaan rendah. Namun demikian, dengan melanggar asumsi proporsionalitas melalui inovasi dan portofolio investasi yang lebih mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya lahan kering (di darat) dan sumberdaya perairan (di laut), pilihan kepada pengembangan plasmanutfah eksotik dan revitalisasi perikanan menyediakan ruang yang juga menjanjikan. Ini berarti pemerintah perlu menggeser proporsi pendanaannya dari subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan ke subsektor lain (perkebunan, perikanan, kehutanan).
22. Perkembangan perdagangan antara Nusa Tenggara Timur dengan sisa-dunia menunjukkan bahwa setelah tahun 2000 terjadi kecenderungan peningkatan ekspor maupun impor. Terdapat empat fenomena penting yakni: (1) Terjadi defisit necara perdagangan (2) Mitra utama ekspor adalah Timor Leste dengan komoditas utama Bahan Bakar Minyak (BBM), dimana komoditas tersebut hanya lalu-lawat; (3) Share Ekspor Impor terhadap PDRB meningkat menuju pola provinsi pelabuhan, tidak selaras dengan

perkembangan NTT yang didominasi oleh hasil panen pertanian; (4) Salah satu impor terbesar non-migas NTT adalah bahan pangan olahan.

23. Dengan mengakumulasikan pencapaian perekonomian Nusa Tenggara Timur 1994-2005, disimpulkan bahwa berbagai kebijakan perekonomian yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum secara optimal menghasilkan perubahan perilaku masyarakat dalam produksi, investasi, menabung dan konsumsi. Hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya: (1), Ketidaksielarasan intervensi pemerintah dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, kapitalisasi dan mekanisasi dengan potensi produksi yang tersedia di Nusa Tenggara Timur, atau (2) Terjadi kesalahan pentargetan (*mistargetting*) intervensi, atau (3) Ukuran-ukuran kesejahteraan menurut sebagian besar masyarakat tidak selaras dengan indikan-indikan kesejahteraan pemerintah.

### **C. Bidang Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang pembangunan suatu wilayah. Dalam penyediaan sarana dan prasarana kebijakan yang ditempuh untuk daerah yang memiliki sarana dan prasarana relatif memadai adalah pengoptimalan pemanfaatan sedangkan untuk daerah yang sarana dan prasarannya kurang memadai adalah memperluas pembangunan sarana dan prasarana.

#### **1. Transportasi Darat, Laut dan Udara**

NTT merupakan provinsi kepulauan, sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau yang satu sama lain dipisahkan oleh laut. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di NTT sangat strategis mengingat posisinya relatif jauh dari pusat-pusat pasar di Indonesia. Sesuai dengan posisi geografisnya, transportasi massal yang potensial dikembangkan adalah transportasi darat untuk internal wilayah dan transportasi laut untuk akses antar pulau dan ke luar wilayah NTT. Peranan transportasi udara masih relatif terbatas dan dominan untuk mendukung akses ke luar wilayah NTT.

**a. Transportasi Darat.** Dalam pembangunan sarana prasarana transportasi darat di NTT membutuhkan biaya relatif besar disebabkan topografinya memiliki tingkat keterlerangan curam dan berbukit dan secara

geografis terdiri dari ribuan pulau sehingga transportasi darat hanya optimal pada pulau yang besar.

Jalan didominasi oleh jalan kerikil dan tanah terlihat dari masih tingginya persentasi jalan kerikil dan tanah terhadap jalan aspal.

Dalam 10 tahun terakhir, jalan aspal yang dibangun mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya kecuali di Kota/Kabupaten Kupang.

Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada perubahan yang signifikan persentasi antara jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Persentasi jalan nasional dan provinsi relatif kecil dibanding dengan jalan kabupaten dengan demikian dominan tanggung jawab pembangunan jalan adalah pada tingkat kabupaten.

Dalam 10 tahun terakhir, kondisi jalan tidak mengalami perbaikan yang signifikan bahkan cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Panjang jalan yang termasuk kategori rusak dan rusak berat naik. Kerusakan tersebut hampir merata di setiap kabupaten kecuali di Kota Kupang, Kabupaten Belu dan Flores Timur.

Sarana dan prasarana jalan belum didukung oleh sarana dan prasarana jembatan dan terminal yang memadai.

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah kendaraan di NTT naik cukup pesat. Jumlah sepeda motor meningkat sekitar tiga kali lipat. Jeep dan sedan naik sekitar 40%, mini bus/mikro bus naik lebih dari 50%. Truk, pick up dan modil tangki naik lebih dari 25%. Pertumbuhan jumlah kendaran tersebut jika tidak diimbangi oleh ketersediaan sarana dan prasarana jalan akan menimbulkan masalah lalulintas terutama di perkotaan.

Walau masih tertinggal dibanding dengan wilayah lainnya di Indonesia seperti pulau Jawa, setiap tahun anggaran pemerintah melakukan pembangunan, perbaikan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan terminal. Akses transportasi darat dari desa ke kota dan beberapa wilayah terisolir dilakukan melalui pembukaan jalan baru. Setiap tahun anggaran, pemerintah melakukan pemeliharaan berkala jalan; pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dan peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan.



Sebagian besar wilayah NTT mempunyai topografi berbukit, tingkat kelerengan curam sehingga secara umum rawan longsor, erosi, kecelakaan lalu lintas dan bencana alam lainnya. Akses transportasi darat dari desa ke kota banyak berada di medan yang sulit. Biaya pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat tinggi dan hanya dapat berfungsi optimal pada pulau yang besar sehingga hubungan darat antar provinsi maupun kabupaten kurang efektif.

Permasalahan 20 tahun mendatang adalah pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi darat. Hal ini terutama dihadapi kabupaten/kota karena dominan jalan di NTT jalan kabupaten.

Jumlah kendaraan 20 tahun ke depan diperkirakan akan meningkat 5 sampai 10 kali lipat. Jika pertumbuhan jumlah kendaraan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana jalan akan memicu masalah lalu lintas terutama diperkotaan.

**b. Transportasi Laut.** Sebagai wilayah kepulauan, transportasi yang potensial dikembangkan di NTT adalah transportasi laut.

1.11 Kemampuan keuangan dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut (seperti pengadaan kapal dan pembangunan dermaga/pelabuhan) masih terbatas. Jumlah manusia dan barang yang dapat diangkut melalui laut masih terbatas dan biaya pengangkutan masih mahal.

1.12 Dalam 10 tahun terakhir, *volume bongkar muat barang* melalui pelabuhan laut di NTT pertumbuhannya tidak signifikan. Dominan hanya pada sejumlah kecil pelabuhan seperti Tenau Kupang, Maumere Sikka dan Kalabahi Alor sedang pada pelabuhan lainnya masih rendah.

1.13 Dalam 10 tahun terakhir, *arus kunjungan kapal laut* (jenis pelayaran: samudra, nusantara, lokal, khusus, perintis dan rakyat) pada pelabuhan laut NTT naik lebih dari 300%. Pada tahun 2004, jumlah kapal laut yang datang dan berangkat dari pelabuhan NTT tertinggi di Larantuka Flores Timur dan Tenau Kota Kupang.

- 1.14 Dalam 10 tahun terakhir, *arus penumpang kapal laut* pada berbagai pelabuhan di NTT mengalami kenaikan. Namun demikian, arus penumpang tersebut dominan hanya melalui pelabuhan tertentu seperti Larantuka, Tenau dan Maumere sedang melalui pelabuhan lainnya relatif rendah.
- 1.15 Dalam 10 tahun terakhir, arus kunjungan kapal *verry*, volume bongkar muat barang dan arus penumpang melalui pelabuhan penyebarangan *verry* meningkat signifikan.
- 1.16 Secara umum, peranan transportasi laut meningkat dalam 10 tahun terakhir. Namun demikian, masih terjadi disparitas antar wilayah. Terdapat sejumlah wilayah yang belum bisa disinggahi kapal *Pelni*, perintis dan jenis kapal lainnya karena kondisi pelabuhan belum memadai. Masih ada ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut antar kabupaten.
- 1.17 Sampai saat ini, transportasi laut belum banyak berperan dalam mendukung ekspor-impor.
- 1.18 Peranan transportasi laut dalam perekonomian NTT diperkirakan akan semakin penting dalam 20 tahun mendatang. Terutama dalam perdagangan antar pulau, provinsi dan negara. Hal ini sesuai dengan posisi geografi NTT sebagai provinsi kepulauan dan dekat dengan beberapa negara tetangga. Peluang yang dapat dikembangkan dimasa mendatang adalah meningkatkan dan membuka jalur transportasi laut dari beberapa wilayah di NTT ke beberapa wilayah di negara Timor Leste dan Australia untuk meningkatkan volume perdagangan terutama hasil-hasil pertanian.
- 1.19 Analisis proyeksi ancaman di bidang transportasi laut dimasa mendatang adalah kecelakaan akibat ombak, cuaca dan kebakaran. Selain itu, terkait masalah keamanan dan perdagangan ilegal terutama di perbatasan negara tetangga khususnya Timor Leste dan Australia. Terjadinya perubahan iklim global menyebabkan perubahan cuaca yang kadang sulit diprediksi dan dapat mempengaruhi efektifitas dan keamanan transportasi laut.

- 1.20 Sarana dan prasarana transportasi laut masih banyak tradisional dengan teknologi rendah.
- 1.21 Mengingat peranan transportasi laut yang strategis dan potensail di NTT, perlu modernisasi sarana dan prasarana perhubungan laut termasuk pengadaan berbagai jenis kapal modern untuk meningkatkan arus penumpang dan barang dari dan keluar NTT. Arus kunjungan berbagai jenis kapal diperkirakan akan meningkat sesuai dengan perkembangan ekonomi. Peranan transportasi laut dalam ekspor impor diperkirakan akan semakin penting terutama dari dan ke Timor Leste dan Australia.

**c. Transportasi Udara.** Transportasi udara di NTT secara umum belum berkembang. Jumlah pesawat yang datang dan berangkat dari NTT masih relatif rendah. Selain itu, masih terdapat beberapa daerah/bandara yang cukup rendah dikunjungi pesawat. Volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara masih rendah. Pengangkutan komoditi lingkup intra provinsi maupun antar provinsi melalui pesawat udara juga masih rendah. Sarana dan prasarana bandara secara umum masih kurang dan dominan merupakan bandar udara yang sedang berkembang, secara finansial belum mandiri.

- 1.22 Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pesawat yang datang dan berangkat melalui bandar udara di NTT tidak signifikan bertambah, bahkan pada periode Tahun 1996-2003 menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, bandara udara yang relatif padat disinggapi pesawat di NTT adalah bandara udara El Tari Kupang, Mali Alor, Wai Oti Sikka, Mauhau Sumba Timur dan Komodo Mangarai Barat. Dari sejumlah bandara di NTT, yang cukup pesat berkembang dalam 10 tahun terakhir adalah bandara udara Mali, Mauhau dan Komodo, dimana jumlah pesawat yang datang dan pergi meningkat pesat dibanding 10 tahun sebelumnya, sedangkan bandar udara lainnya relatif konstan dan bahkan sebagian menurun
- 1.23 Volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara juga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Bongkar muat barang melalui pelabuhan udara di NTT terutama melalui bandara udara El Tari, Wai Oti dan Mali, sedang bandara lainnya relatif tidak berkembang.

- 1.24 Arus penumpang melalui pelabuhan udara selama periode 1994-2003 tidak signifikan bertambah bahkan pada periode tahun 1998-2002 terjadi penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Arus penumpang yang datang dan berangkat lewat pelabuhan udara di NTT terutama adalah melalui bandara udara El Tari Kupang, Wai Oti dan Mali, sedangkan melalui bandara lainnya relatif sedikit.
- 1.25 Peranan transportasi udara dalam perekonomian NTT diperkirakan akan semakin penting dalam 20 tahun mendatang. Terutama dalam mendukung eksport-import dan pariwisata. Hal ini sesuai dengan posisi geografi NTT dekat dengan Timor Leste dan Australia; perairan pesisir dan laut serta budaya NTT potensial dalam pariwisata serta posisi NTT yang dekat dengan Pulau Bali. Sejumlah bandara udara di NTT diperkirakan potensial berkembang menjadi bandara udara Internasional. Jalur penerbangan ke Timor Leste dan ke beberapa negara bagian di Australia potensial dikembangkan. Peranan transportasi udara dalam angkutan barang, khususnya barang bernilai ekonomi tinggi diperkirakan akan meningkat terutama ke Indonesia bagian barat dan ke beberapa negara tetangga.
- 1.26 Proyeksi ancaman, transportasi udara secara umum rawan kecelakaan karena banyak bandara berada/dekat area perbukitan; sarana dan prasarana bandara masih minim dan sering terjadi perubahan cuaca. Selain itu, juga rawan akan pelanggaran batas udara karena posisi NTT yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia.

## **2. Akses Terhadap Air Bersih dan Sanitasi**

Kondisi iklim di NTT relatif kering dan curah hujan terbatas sehingga sumberdaya air terbatas. Permasalahan utama dibidang akses terhadap air bersih adalah ketersediaan yaitu air yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan. Banyak rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air bersih seperti mendapat layanan air minum perpipaan. Kemampuan PAM menyediakan air; pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan perpipaan; menemukan sumber air baru dan meningkatkan debit air yang ada masih terbatas. Efisiensi PAM memanfaatkan air juga masih kurang. Air bersih harganya belum terjangkau masyarakat sehingga jumlah pelanggan air minum masih rendah.

- 2.1. Saat ini, sebagian besar rumah tangga di NTT menggunakan sumber air minum dari mata air, sumur dan sungai. Sekitar 42.32% rumah tangga menggunakan fasilitas air minum umum. Sebanyak 28.51% menggunakan fasilitas air minum bersama dan hanya 17.03% yang menggunakan fasilitas air minum sendiri.
- 2.2. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah rumah tangga yang memakai air minum yang bersumber dari leding pertumbuhannya sangat rendah demikian juga halnya yang menggunakan fasilitas air minum sendiri.
- 2.3. Kondisi sanitasi lingkungan secara umum masih rendah, terutama di pedesaan dan kawasan pesisir pantai. Jumlah rumah tangga yang tidak dapat memiliki akses terhadap sanitasi yaitu tidak memiliki kamar mandi sendiri atau tidak dapat memanfaatkan fasilitas kamar mandi umum masih tinggi. Sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah untuk menangani sampah juga masih terbatas terutama diperkotaan.
- 2.4. Jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban menurut jenis kloset, dominan menggunakan kloset jenis cemplung, disusul jenis leher angsa dan plengsengan. Dalam sepuluh tahun terakhir, kemajuan tidak begitu signifikan.
- 2.5. Kesadaran masyarakat terhadap sanitasi secara umum juga masih rendah. Banyak rumah penduduk sumber airnya (pompa, sumur, mata air) berdekatan dengan tempat penampungan kotoran/tinja dan relatif tidak berubah dalam sepuluh tahun terakhir.
- 2.6. Namun demikian, peningkatan ketersediaan air di NTT masih potensial. Masih terdapat sumber-sumber air yang belum dikembangkan; sumber daya air yang ada masih potensial ditingkatkan produktifitasnya, dan efisiensi pemanfaatan air saat ini masih dapat ditingkatkan.
- 2.7. Kondisi NTT saat ini, belum mengalami kendala yang signifikan dalam masalah sanitasi dan persampahan, sehingga masih relatif mudah dalam perencanaan pengelolaan di masa mendatang.

- 2.8. Ancaman, jika konservasi tidak dilakukan khususnya di DAS dan sumber-sumber mata air, dimasa mendatang NTT berpotensi rawan akan krisis air. NTT merupakan wilayah yang tergolong kering dimana hanya 4 bulan keadaannya relatif basah sedang 8 bulan lainnya relatif kering.
- 2.9. Banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dapat memicu masyarakat mengkonsumsi air yang tidak higienes dan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Selain itu, minimnya ketersediaan air dapat mengurangi minat usaha.
- 2.10. Banyak rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dapat memicu berbagai jenis penyakit terutama penyakit menular.

### **3. Kelistrikan**

Permasalahan utama dibidang kelistrikan adalah kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan. Kebutuhan energi listrik untuk rumah tangga, industri, perkantoran, perhotelan dan lain-lain belum seluruhnya dapat dilayani PLN. Selain itu, masih terdapat masalah dalam pemerataan distribusi, keterbatasan daya, ketepatan waktu, volume maupun kontinuitas suplai. Terbatasnya sumber daya listrik di NTT menyebabkan banyak rumah tangga terutama di pedesaan belum menikmati layanan listrik. Dari seluruh rumah tangga di NTT, dominan masih menggunakan pelita, sentir atau obor untuk penerangan rumah. Jumlah rumah tangga yang menggunakan layanan PLN hanya 34.06% sedang sisanya menggunakan petromak atau sumber penerangan lainnya.

- 3.1. Permasalahan dalam pemerataan adalah adanya kesulitan geografis, yaitu luasnya wilayah berbentuk kepulauan dengan densitas penduduk yang bervariasi sehingga menyulitkan pengembangan sistim kelistrikan yang efisien.
- 3.2. Ketergantungan pembangkit listrik di NTT terhadap BBM sangat besar karena penggunaan sumber energi lainnya seperti energi matahari, arus laut, tenaga angin, panas bumi dan lain-lain belum berkembang.
- 3.3. Kemampuan keuangan pemerintah untuk merehabilitasi dan membangun pembangkit listrik baru terbatas. Peranan swasta, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan listrik

belum berkembang. Daya beli masyarakat terhadap listrik umumnya masih rendah.

- 3.4. Di masa mendatang perlu memberi peluang yang lebih besar pada swasta, pemerintah daerah dan masyarakat membangun pembangkit listrik terutama listrik non BBM. Ketergantungan pada pembangkit listrik BBM perlu diperkecil melalui penggunaan energi matahari, biodiesel, panas bumi, hidro gas, batu bara, gelombang atau sumber energi lainnya yang potensial di NTT.
- 3.5. NTT berpeluang meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terutama pembangkit listrik non BBM. Sesuai dengan kondisi kimatologi dan luasnya laut, penggunaan energi suria, gelombang dan angin potensial dikembangkan. Hal ini akan dapat mengatasi luasnya wilayah NTT yang menyulitkan pengembangan sistim kelistrikan PLN konvensional.

#### **4. Pemukiman**

- 4.1. Permasalahan dibidang sarana dan prasarana pemukiman adalah masih banyak rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri dan banyak rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan terutama di pedesaan dan kawasan pesisir pantai. Kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni atas kemampuannya sendiri masih rendah.
- 4.2. Dari jumlah rumah tangga yang memiliki rumah, rumah dengan jenis lantai terluas terdiri dari tanah sangat tinggi yaitu mendekati 50 persen dan cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dari 881.120 rumah pada tahun 2004 sebanyak 403.463 rumah lantainya sebagian besar terdiri dari tanah.
- 4.3. Dalam 10 tahun terakhir, walau jumlah rumah yang dibangun meningkat setiap tahun, peningkatan tersebut relatif kecil dibanding peningkatan kebutuhan sesuai pertambahan penduduk. Pada tahun 1997, sebanyak 716.638 rumah hanya meningkat menjadi 881.120 pada tahun 2004, dari jumlah tersebut 68 persen luasnya < 50 m<sup>2</sup> dan lebih dari 90 persen rumah di NTT luasnya < 100 m<sup>2</sup>.

- 4.4. Sekitar 80 persen rumah di NTT beratapkan seng, sisanya terbuat dari daun, ijuk, sirap dan hanya sebagian kecil dari genteng atau beton. Berdasarkan jenis temboknya, rumah di NTT didominasi oleh dinding bambu, disusul tembok dan kayu. Dalam 10 tahun terakhir, walau terjadi pertumbuhan rumah tembok batu, namun pertumbuhan tersebut tidak signifikan karena rumah bertembok bahan murah lainnya juga meningkat.

## **5. Telekomunikasi/Telematika**

Dalam 10 tahun terakhir, penggunaan berbagai jenis sarana dan prasarana telekomunikasi /telematika meningkat, mulai dari penggunaan telepon, internet, televisi, radio dan lain-lain. Namun demikian, akses terhadap Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi ini dominan hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, umumnya yang tinggal di perkotaan. Secara umum, akses terhadap telekomunikasi/telematika tersebut belum terjangkau ekonomi masyarakat. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang telekomunikasi/telematika tersebut masih terbatas.

- 5.1. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pelanggan telepon swasta naik cukup signifikan yaitu dari 10.250 pelanggan tahun 1994 menjadi 36.562 pada tahun 2004. Jumlah pelanggan telepon pemerintah naik, yaitu dari 1.988 pelanggan tahun 1994 menjadi 2.525 tahun 2004. Namun demikian, jumlah pelanggan telepon tersebut sebagian besar hanya terdapat di Kota/Kabupaten Kupang.
- 5.2. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah kantor pos hanya sedikit mengalami kenaikan yaitu dari 92 tahun 1994 menjadi 127 tahun 2004. Kantor pos tersebut dominan berada di kota/kabupaten Kupang, yaitu dari 127 kantor pos, 23 di kota/kabupaten Kupang. Penyebaran kantor pos di kabupaten lainnya relatif merata kecuali di kabupaten Lembata, Rote Ndao dan Manggarai Barat masing-masing baru mempunyai satu kantor pos.
- 5.3. Dalam 20 tahun mendatang diperkirakan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi, penyiaran dan lain-lain di NTT akan meningkat pesat. Investasi dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi/telematika terutama swasta diperkirakan akan meningkat. Saat ini, terdapat sejumlah wilayah potensial di NTT yang cukup menarik dalam investasi dan belum berkembang.



Selain itu, akibat semakin berkembangnya perekonomian NTT, kebutuhan akan teknologi telekomunikasi dan telematika juga meningkat.

## **6. Sumberdaya Air dan Irigasi**

Tujuan pembangunan di bidang sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi adalah meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan lahan beririgasi dan intensitas tanam.

- 6.1. Dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk meningkat permintaan akan kebutuhan pangan. Untuk memenuhi permintaan tersebut perluasan areal tanam dan intensitas tanam diperlukan.
- 6.2. Salah satu permasalahan di NTT adalah luas lahan beririgasi terbatas sehingga hasil pertanian masih rendah. Di sisi lain, lahan tidur/kritis yang potensial dikembangkan menjadi lahan produktif cukup besar, namun belum dapat dimanfaatkan karena terbatasnya sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi seperti embung, bendungan dan jaringan irigasi lainnya.
- 6.3. Program embung kecamatan dan desa dan program seribu embung yang dicanangkan untuk meningkatkan areal tanam dan intensitas tanam dan penyediaan air minum belum optimal. Dana pembangunan dan pemeliharaan bendungan, embung dan saluran irigasi terbatas. Selain itu, usaha untuk melindungi kawasan tangkapan air dan daerah aliran sungai untuk mendukung ketersediaan air belum optimal.
- 6.4. Dalam 10 tahun terakhir, lahan yang diairi (irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana, tadah hujan dan pasang surut) tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada periode Tahun 1994 sampai 2004, lahan yang diairi di NTT dominan hanya di Kota/kabupaten Kupang, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur sedang di kabupaten lainnya relatif kecil.
- 6.5. Sampai dengan tahun 2005, jumlah embung kecil yang sudah dibangun di NTT sebanyak 334 buah dengan daya tampung  $8.318.112 \text{ m}^3$ , embung irigasi sebanyak 24 buah dengan daya tampung  $4.222 \text{ m}^3$  untuk mengairi lahan seluas 4.222 Ha.

## **7. Sarana Kesehatan dan Pendidikan**

- 7.1. Permasalahan dibidang sarana dan prasarana kesehatan di NTT adalah kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain-lain tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan. Satu rumah sakit misalnya melayani sekitar 119.913 orang. Selain itu, kapasitas tempat tidur juga masih belum sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, peralatan yang tersedia juga secara umum belum sesuai dengan perkembangan teknologi.
- 7.2. Di bidang pendidikan, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal belum sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan keuangan pemerintah untuk membangun kelas/gedung dan sarana dan prasarana pendidikan lainnya seperti teknologi informasi (TI), perpustakaan, sarana sanitasi dan UKS dan sarana pembelajaran lainnya masih terbatas. Jumlah gedung kategori rusak dan rusak berat tinggi dan cenderung meningkat. Selain itu, permasalahan juga terkait dengan masalah distribusi antar wilayah.
- 7.3. Pada 10 tahun terakhir, terjadi pertumbuhan sarana dan prasarana kesehatan seperti jumlah rumah sakit, kapasitas tempat tidur, puskesmas, posyandu dan dan lain-lain. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih belum sesuai dengan peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk, sehingga belum mampu menurunkan nisbahnya terhadap jumlah penduduk. Demikian juga halnya dengan sarana dan prasarana pendidikan.

## **D. Bidang Politik dan Pemerintahan**

1. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengalami perubahan sejak berdirinya pada tahun 1958, tetapi jumlah kabupaten/kota di dalam Provinsi NTT bertambah dari 12 (dua belas) menjadi 19 (sembilan belas) kabupaten/kota melalui pembentukan Kota Kupang, Kabupaten Lembata, Rote-Ndao, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Nagakeo.
2. Sepanjang usia NTT, perencanaan dan penetapan anggaran pembangunan selalu menggunakan data luas geografis/daratan

karena itu alokasi dana pembangunan melalui APBN belum memadai untuk mendukung pembangunan di wilayah NTT

3. Pelaksanaan otonomi daerah di NTT belum sepenuhnya membawa dampak positif bagi rakyat di daerah. Beberapa dampak negative yang perlu diantisipasi pemecahannya antara lain:
  - a. Gubernur atau Bupati/Walikota yang memenangkan pemilihan Kepala Daerah sering menggunakan kewenangan pengelolaan personalia yaitu penarikan (*recruitment*), promosi dan penempatan (*placement*) apparatus yang kurang bernuansa sistem karier dan prestasi (*merit system*). Nepotisme cukup terasa dalam sendi-sendi pengelolaan personalia.
  - b. Desentralisasi dan otonomi berdampak negative terhadap pengisian jabatan. Promosi kenaikan pangkat 2 kali setahun tidak diikuti dengan pengembangan kualitas sumberdaya aparatur, dan hal ini berdampak negative terhadap pembentukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena itu program pemberdayaan apparatus dan pemerintah melalui pembangunan kapasitas (*capacity building*) menjadi prerequisite bagi pencapaian pemerintahan yang berwibawa.
  - c. Isme sektoral dan wilayah sering masih mengendalai koordinasi lintas pemerintahan kabupaten dan antar pemerintah kabupaten dengan provinsi. Rupanya otonomi telah berdampak negatif terhadap perumusan dan pelaksanaan kewenangan koordinasi.
  - d. Terdapat kecenderungan titik berat keberpihakan pembangunan khususnya anggaran pembangunan kepada kepentingan pemerintah dan kurang berpihak kepada kepentingan pembangunan dan masyarakat. Selain itu, kontrol sosial masyarakat oleh organisasi non pemerintah (LSM), dan media massa terhadap ketidakberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat belum efektif.
  - e. Fanatisme kedaerahan, kesukuan, kekeluargaan, keagamaan, yang masih kuat menjadi salah satu bahaya disintegrasi bangsa di tengah - tengah upaya mempertahankan NKRI.

4. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, namun terkendala oleh kondisi geografis archipelago dan terbatasnya sediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara dan kondisi tersebut mendisefektifkan dan menginefisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
5. Profesionalisme dan kapasitas aparatus belum memadai diindikasikan oleh kualitas layanan aparatus dan lembaga pemerintah sebagai public servant. Berbagai keluhan tentang rendahnya mutu layanan prima pemerintah dan inefisiensi pemanfaatan sarana, dan sikap diskriminasi layanan masih mencoraki pelaksanaan tugas pemerntahan di wilayah ini.
6. Pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan efektif karena dikendalai oleh kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah otonom masih menggantungkan kemampuan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan pada bantuan pemerintah pusat.
7. Organisasi pemerintahan belum sepenuhnya merespons visi penghematan struktur baik pada aras provinsial maupun kabupaten. Gerakan efisiensi ini sekaligus menjadi kiat proaksi pengurangan ketergantungan kepada kemampuan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada sumber luar
8. Otonomi daerah berpeluang membawa dampak positif bagi masyarakat mengingat sumber daya manusia yang makin baik, ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam hampir semua kegiatan pembangunan.
9. Pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi melalui proses pilkada di Nusa Tenggara Timur telah berjalan, namun kesadaran politik masyarakat, pemerintah dan lembaga - lembaga politik seperti partai politik masih lemah untuk mengawal proses demokrasi tersebut agar berlangsung jujur dan adil.
10. Dukungan pemerintah daerah provinsi NTT untuk menyukseskan pemilihan umum langsung anggota DPR, DPD dan DPRD Kota/Kabupaten serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

pada tahun 2004, telah berjalan aman, jujur, adil dan demokratis. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan penting di bidang politik dan pemerintahan, demikian juga pemilihan kepala daerah secara langsung di enam kabupaten. Keberhasilan ini semua merupakan modal awal untuk berkembangnya demokrasi di masa yang akan datang di provinsi ini. Transisi demokrasi menuju kehidupan politik yang lebih demokratis di masa yang akan datang berpeluang akan berjalan lancar.

11. Pematokan tiga puluh persen alokasi target perempuan dalam politik belum terpenuhi. Kendala yang paling utama dirasakan di NTT adalah faktor sosial - budaya disamping kesiapan sumber daya perempuan yang relative terbatas. Pemenuhan tiga puluh persen target perempuan dalam politik seperti menduduki jabatan-jabatan politik berkecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.
12. Hak inisiatif DPRD untuk mengajukan rancangan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk perjuangan politik atas tuntutan dan dukungan rakyat belum sepenuhnya terlaksana.
13. Stabilitas keamanan dan ketertiban sangat kondusif dan terkendali, sekalipun penentuan referendum di Timor-Timur berdampak besar bagi keamanan dan ketertiban di wilayah Timur Indonesia bagian barat, namun berkat kesiapan pemerintah daerah, aparat keamanan dan dukungan masyarakat, dampak tersebut dapat diatasi. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif ini diharapkan akan menjadi salah satu prasyarat penting untuk memacu pembangunan pada bidang yang lain seperti: bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.
14. Pemekaran dan pembentukan beberapa kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, memperpendek jarak pelayanan, membuka ruang partisipasi yang semakin luas dan memacu pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan ekonomi di daerah melalui pemberian kewenangan dan tanggungjawab pemekaran dan pembentukan kabupaten.

15. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan, karena itu alokasi anggaran pemerintah dan pembangunan dari pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kondisi ini. Dengan menjadi provinsi kepulauan provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai peluang untuk dimekarkan menjadi dua provinsi demi mendekatkan dan memperpendek jarak pelayanan publik. Untuk tingkat kabupaten dari 16 kabupaten masih berpeluang untuk dimekarkan menjadi 18 kabupaten, selanjutnya untuk tingkat kecamatan.
16. Organisasi politik di Nusa Tenggara Timur baik pada tingkatan superordinasi, dan subordinasi yaitu partai politik lokal belum sepenuhnya memiliki platform politik yang jelas. Institusionalisasi dan karakterisasi visi dan misi politik pada anggota partai politik sangat lemah hal ini terindikasi dari mudahnya pergantian platform politik anggota antar partai politik. Indikan tersebut sekaligus menunjuk pada motif dan motivasi anggota partai politik yang tidak bertaat azas dengan perjuangan politik partai, tetapi lebih bernuansa kepentingan pribadi.
17. Kualitas kinerja partai politik dalam bidang perpolitikan dan pendidikan politik masih lemah dan berdampak negatif terhadap kualitas kinerja representasinya dalam lembaga legislatif. Besarnya jumlah peraturan daerah yang ditolak merupakan salah satu petunjuk, selain kualitas pelaksanaan fungsi dan hak lembaga legislatif. Kinerja Program kerja partai politik masih berkisar waktu pada pemilihan umum karena itu rentang waktu antar pemilihan umum intensitas kegiatan program sangat rendah.

## **E. Bidang Hukum dan HAM**

1. Krisis multi dimensi yang diawali oleh krisis keuangan di penghujung era Orde Baru diyakini disebabkan, antara lain, oleh karena hukum cenderung difungsikan semata sebagai instrument legitimasi penyelenggaraan kekuasaan politik. Era reformasi mengayunkan pendulum paradigma ke arah supremasi hukum. Krisis juga diyakini disebabkan oleh sentralisasi kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif, dan sebab itu era reformasi secara bertahap terarah pada proses konstruksi hukum secara terdesentralisasi. Dengan demikian supremasi hukum dewasa ini adalah supremasi hukum yang dikonstruksikan secara demokratis. Ini berarti bahwa telah terjadi perluasan tekanan masalah hukum.

Masalah validitas hukum tidak lagi hanya ditekankan pada aspek-aspek filosofis dan yuridis saja, tetapi juga mencakup aspek sosiologisnya. Masalah efektivitas sistem hukum tidak lagi bertumpu pada kekuatan daya paksa yang melebihi daya resistensi, tetapi bergeser ke masalah efektivitas yang bertumpu pada dukungan sosial. Ini berarti bahwa selain wajib konkordan dengan struktur hukum nasional, struktur hukum di daerah juga mesti bersifat kontekstual yang memungkinkan akses ke keadilan dapat menempuh berbagai cara dan memanfaatkan berbagai lembaga alternative. Ini berarti bahwa substansi hukum produk daerah tidak semata merupakan penjabaran dari ketentuan perundangan yang lebih tinggi melainkan juga dengan sengaja dimaksudkan untuk mengontrol dan merekayasa realitas serta demi menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ini berarti bahwa kultur hukum di daerah tidak mungkin lagi bersifat ortodoks semata melainkan terutama mesti berkarakter responsif.

2. Rekonstruksi struktur hukum di NTT konkordan dengan struktur hukum nasional. Di tingkat nasional rekonstruksi dilakukan ketika institusi-institusi yang ada ternyata tidak efektif lagi dalam menjawab berbagai masalah yang timbul seiring dengan perkembangan sosial kontemporer. Perubahan masyarakat ditandai oleh meningkatnya hasrat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik yang semakin demokratis, pilihan ideologi dan partai politik yang semakin beraneka, meningkatnya sikap dan daya kritis, dan tuntutan akan hukum yang berkarakter responsif, dan desakralisasi UUD 1945 dan berbagai lembaga Negara. Susunan kekuasaan Negara setelah amandemen UUD 1945 berubah secara fundamental. DPA diadukan, DPD dibentuk, dan MPR berubah dari lembaga tertinggi Negara menjadi lembaga gabungan DPR dan DPD. Lembaga-lembaga baru juga dibentuk seperti: Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum, PUN, Bank Indonesia yang tadinya berada di bawah garis komando Presiden, sekarang telah menjadi lembaga yang independen.. Selain itu fungsi DPR dan DPRD dipertegas kewenangannya baik sebagai legislator maupun sebagai supervisor. Aturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta kekuasaan Mahkamah Agung ditambah dengan tugas-tugas yang tadinya diemban oleh Departemen Kehakiman, sekaligus dibatasi dalam hal rekrutmen hakim agung. Pembatasan ini memicu konflik antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial; perubahan struktur dan fungsionalisasi struktur

dimaksud memicu berbagai fenomena hukum di daerah. Profesionalisme legislator di daerah kini ditentukan melalui proses demokratis dengan syarat kompetensi profesionalitas yang tidak optimal.

3. Konsekuensi otonomi daerah kabupaten-kota adalah, antara lain, dikonstruksinya produk hukum yang secara konseptual mungkin sesuai kebutuhan lokal namun belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum lebih tinggi yang dijadikan referensi, *vice versa*. Model konstruksi hukum pada tataran legislasi telah bertambah dari penekanan pada validasi substansi pada ketentuan hukum yang lebih tinggi dan keabsahan procedural konstruksi serta keabsahan otoritas konstruktor, dengan justifikasi saintifik, penyerapan aspirasi rakyat secara langsung, kearifan lokal dan orientasi utilitarian mendapangi keadilan dan kepastian.
4. Penguasaan tanah tanpa hak, nepotisme dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, TKI/TKW ilegal, KDRT, konflik horizontal dan vertikal, konflik ideologi ekonomi neo-libertarian dengan ideologi hubungan simbiotik mutualistik manusia dengan alam, penguasaan dan eksploitasi pulau-pulau kecil, kejahatan internet, merupakan aneka masalah sosial yang menonjol selama sepuluh tahun terakhir. Tetapi penekanan kalangan akademik seperti ini tidak selaras dengan model konvensional kepolisian yang lebih cenderung menekankan urgensi kejahatan-kejahatan konvensional seperti: curat, curas, curanmor, pembunuhan, perkosaan dan kenakalan remaja. Polisi adalah pintu pertama penanganan masalah pidana. Jika perhatian polisi dituamakan terarah ke kejahatan-kejahatan konvensional saja, maka kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat justru akan lolos dari jeratan hukum.
5. Pada aras penegakan hukum, yurisdiksi *de yure* dan atau *de facto* lembaga-lembaga penegak hukum konvensional tidak lagi bersifat satu-satunya. Korupsi, misalnya, sebagai salah satu masalah sosial utama, ditangani oleh berbagai lembaga tanpa pembatasan yurisdiksi yang jelas antara polisi, kejaksaan, Timtastipikor, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tanpa hierarki pengambilan keputusan yang jelas. Dilihat dari kecenderungan politik hukum seperti itu, maka tampaknya pembuat kebijakan mengira bahwa penyebab ketidakefektifan terletak pada kurang sempurnanya



institusi, padahal penyebab dimaksud lebih banyak dicitrakan terletak pada komitmen dan kompetensi para fungsionaris hukum.

6. Daya tampung dan kapasitas penyelesaian masalah kriminal dan patologi oleh institusi penegak hukum rendah, model proses tidak konsisten dan mutu produk sulit diprediksi. Walaupun citranya tidak memuaskan, namun tidak ada data tentang komitmen dan kompetensi profesionalitas para penegak hukum yang bertugas di NTT. Tingginya "eigenrichting" atau main hakim sendiri dan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding dan putusan Pengadilan Tinggi yang dimintakan kasasi, dan permintaan PK merupakan indikasi rendahnya mutu putusan pengadilan. "Eigenrichting" memang berkonotasi negatif, namun di sisi lain merupakan katup pengaman bagi kasus-kasus yang penyelesaiannya tak tersalurkan melalui, dan atau bagi warga masyarakat yang tak mempercayai, sistem resmi.
7. Paradigma para fungsionaris hukum di NTT dapat dikategorisasikan berdasarkan orientasi utama tertentu, yaitu penegakan sistem dalam rangka memenuhi cita hukum kepastian, atau menggunakan sistem secara fleksibel dalam rangka memenuhi cita hukum pemecahan masalah, atau menggunakan sistem dalam rangka mewujudkan cita hukum keadilan versi tertentu. Kategori pertama dapat dipilah lagi atas penganut yurisprudensi pengertian, yaitu fungsionaris yang cenderung menerapkan ketentuan perundangan sebagaimana adanya; penganut yurisprudensi asas, yaitu mereka yang menerapkan ketentuan hukum dengan merujuk pada asas-asas hukum, dan; penganut yurisprudensi kepentingan. Sementara para penegak sistem cenderung menggeneralisasi kasus sesuai dengan sistem yang mapan, maka para pengguna sistem demi pemecahan masalah dan atau perwujudan keadilan justru bertumpu pada keunikan kasus. Kaidah dan asas dipandang sebagai fiksi belaka, sebab, bagi mereka, penyelesaian terbaik adalah yang inheren dengan keunikan kasus itu sendiri.
8. Selama sepuluh tahun terakhir ini konsep hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal telah mulai diadopsi dalam berbagai kebijakan daerah NTT. Dua kelompok masyarakat, yaitu perempuan dan anak-anak dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM. Kriteria pelanggaran dimaksud mengadopsi criteria dalam konsep HAM universal, padahal dalam

konsep kultur lokal pelanggaran tertentu dipandang sebagai kelaziman atau sedikitnya bukan pelanggaran. Tetapi kerentanan ini bersifat sementara dan akan tereliminasi di masa depan. Di masa depan diprediksikan terjadi penekanan yang berbeda, yaitu pada aplikasi konsep kebebasan individual. Kebebasan dimaksud berorientasi ganda, yaitu bebas dari hambatan-hambatan artificial yang tidak wajar atau tidak adil, sebagai prasyarat agar bebas untuk mengaktualisasikan diri secara optimal. Kebebasan sebagai esensi HAM tersebut telah diakui secara konseptual dan dijamin keberadaannya dalam ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional, dan hanya soal waktu saja untuk diadopsi dalam peraturan daerah (Perda). Pengakuan dan implementasi HAM tersebut pada tataran internasional, nasional dan lokal merupakan *condition sine qua non* bagi pengembangan pribadi individu dan komunitas, serta bagi kemajuan peradaban daerah, nasional dan dunia. Namun, pengakuan konseptual atau *de jure* sekalipun tidak selalu sama dengan implementasi *de facto* pada tataran lokal. Kultur lokal merespons konsep HAM universal dengan berbagai cara. Ada yang bersikap *receptio in complexu*, yaitu mengadopsi sepenuhnya konsep HAM universal; ada yang meresepsi aspek-aspek tertentu saja sejauh sesuai dengan praksis lokal.

9. Nyaris seluruh pelanggaran HAM di NTT dikategorisasikan sebagai pelanggaran HAM anak dan perempuan. Bentuknya adalah KDRT dan penelantaran anak. Kasus-kasus ini baru sekarang mencuat karena memang sebelumnya dikategorikan bukan sebagai perbuatan pidana, bukan KDRT atau penelantaran, dan karena itu bukan pelanggaran HAM. Perempuan, anak dan para jompo, merupakan kelompok yang rentan karena daya tawar mereka lebih lemah dibanding dengan para pelanggarnya.
10. Perempuan menjadi korban pelanggaran HAM dalam berbagai status dan peranannya dalam interaksi sosial dengan pelakunya adalah relasi atau mitra sejawatnya. Selain kekerasan fisik dan penelantaran, pelanggaran dimaksud juga ada yang bersifat psikis, ekonomi dan seksual, atau gabungan semuanya. Penyebabnya beraneka: merentang dari karakter pelanggar sampai dengan karakter korban, dari kondisi struktural sampai dengan pola cultural yang ajeg. Tidak semua pelanggaran HAM dipublikasikan atau terdata dan ditangani secara sistemik. "Dark number" diduga lebih besar dari yang terdata pada lembaga-lembaga

terkait. Biaya sosialnya juga besar, merentang dari menurunnya produktivitas sampai dengan biaya-biaya penanggulangan dan pemulihan. Selain respons secara hukum, terdapat juga pengulangan secara medis, perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan, pembinaan pelaku, dan pemberdayaan korban dalam rangka memperbaiki posisi tawarnya. Ketidakpedulian terhadap gejala pelanggaran HAM anak disebabkan oleh luasnya skala kejadian. Telah merupakan aksioma dalam politik kriminologi bahwa tingginya minat masyarakat terhadap suatu patologi sosial berbanding terbalik dengan tingginya frekuensi peristiwa. Sekalipun UU mengkategorikannya sebagai pelanggaran, namun tingginya kasus penelantaran anak di NTT menyebabkan fenomena ini dipandang sebagai sesuatu yang lumrah.

## **F. Bidang Geomorfologi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup**

### **1. Geomorfologi dan Sumberdaya Alam**

- 1.1 NTT terletak di belahan Selatan Indonesia, membentang antara  $8^{\circ}$ - $12^{\circ}$  Lintang Selatan (LS) dan  $118^{\circ}$ - $125^{\circ}$  Bujur Timur (BT). Jarak Utara Selatan membentang sepanjang  $4^{\circ}$  dan jarak Barat-Timur sepanjang  $7^{\circ}$ , sehingga NTT berada pada zona iklim tropik yang khas. Letak astronomis kepulauan NTT seluruhnya berada di selatan katulistiwa.
- 1.2 NTT adalah provinsi kepulauan dengan luas daratan 4.734.991 Ha (2.5% dari luas Indonesia) dan luas perairan 18.311.539 Ha. Secara fisik batas wilayah provinsi NTT, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia (Australia), sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste dan Laut Timor, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi NTB). Sebagai propinsi perbatasan dengan Australia dan Timor Leste, posisi NTT strategis dari aspek ekonomi dan geopolitik, namun bukannya tanpa risiko.
- 1.3 NTT terdiri dari 599 pulau, 411 pulau sudah mempunyai nama sedang 188 pulau lainnya belum mempunyai nama. Dari seluruh pulau, 69 pulau telah berpenghuni sedang 530 pulau lainnya belum berpenghuni. Terdapat tiga pulau besar, yaitu Flores,

Sumba dan Timor, serta beberapa pulau kategori sedang yaitu Alor, Lembata dan Rote, dan selebihnya pulau-pulau kecil yang letaknya tersebar.

- 1.4 Berdasarkan ketinggian, 48.78% luas wilayah NTT berada pada ketinggian 100-500 m dpl. Sedangkan di atas 1.000 m hanya sebagian kecil, yaitu 3.65%.
- 1.5 Topografi berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada luluhan sempit. Pada semua pulau, dominan permukaannya berbukit/bergunung, dataran-dataran sempit memanjang di sekitar pantai atau diapit oleh dataran tinggi. Lahan dengan kemiringan 15-40 persen mencapai 38.07% dan kemiringan > 40% mencapai 35.46%. Kondisi geomorfologis demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas, baik pertanian basah maupun kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktifitasnya umumnya rendah.
- 1.6 NTT termasuk dalam kawasan *Circum-Pasifik* sehingga daerah ini, terutama di sepanjang Pulau Flores, memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan). Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau di sekitarnya terbentuk secara vulkanik, sedangkan pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor, dan pulau di sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Kondisi jalur pulau-pulau yang terletak pada jalur vulkanik subur namun sering mengalami bencana alam.
- 1.7 Adanya perbedaan iklim, cuaca dan geologi menghasilkan jenis tanah yang berbeda. Jenis tanah meliputi *Meditran*, *Litosol*, *Alufial*, *Grumosol* dan *Regosol*.
- 1.8 Kedalaman tanah di berbagai daerah relatif tipis yang sebagian besar disebabkan faktor struktur batuan induk berupa koral dan tanah yang terbuka karena vegetasi penutup minim sehingga rentan terhadap erosi. Kedalaman tanah < 30 cm mencapai luas 1.938.403 Ha (40.94%); 31-60 cm seluas 1.186.801 Ha (25.06%); 61-90 cm seluas 199.707 Ha (10.55%) dan 995.489 Ha (21.03%) memiliki kedalaman > 90 cm. Lapisan tanah tipis dengan kedalaman < 30 cm sangat luas sedang lapisan tanah tebal dengan

kedalaman > 90 cm sangat sempit. Kedalaman efektif tanah adalah kedalaman dimana akar-akar tanaman dapat leluasa mengambil unsur hara untuk pertumbuhannya. Sekitar 40.94 % dari luas wilayah NTT atau 1.938.403 Ha memiliki kedalaman efektif 0-30 cm.

- 1.9 Berdasarkan tekstur tanah, provinsi NTT sebagian besar memiliki tekstur kasar (sekitar 47% dari luas total wilayah), tekstur sedang 39% dan tekstur halus 11,33%.
- 1.10 Berdasarkan drainase, 96% berdrainase tidak tergenang. Berdasarkan tingkat erosi, hampir 60% luas tanah mengalami erosi. Tanah yang tererosi ini banyak di jumpai pada jenis penggunaan ladang, alang-alang atau semak belukar dengan kemiringan lereng > 40 %.
- 1.11 NTT termasuk wilayah beriklim kering, dimana 4 bulan (Januari s/d Maret, dan Desember) keadaan relatif basah dan 8 bulan relatif kering. Tingkat curah hujan berbeda-beda tiap daerah dengan rata-rata curah hujan 3.849 mm/tahun. Keadaan curah hujan pada umumnya sulit diramalkan. Datangnya hujan dan mulainya bulan kering kadang terlalu cepat dan kadang terlalu lambat.
- 1.12 Secara umum, keadaan hidrologi di wilayah NTT agak kurang. Hal ini disebabkan musim hujan dalam satu tahun hanya berlangsung selama 3 bulan. Kondisi ini mengakibatkan sulit mengeksploitasi sumber air permukaan. Keadaan tanah pada ekosistem lahan kering secara umum kurang menguntungkan dan merupakan faktor pembatas utama usaha pertanian. Hal ini diindikasikan oleh semua orde tanah tingkat kelembabannya rendah; reaksi tanah netral sampai alkalin; ketersediaan unsur hara makro dan tingkat kesuburan tanah rendah.
- 1.13 NTT banyak mengandung bahan-bahan mineral yang terdiri dari bahan galian seperti: logam mulia, logam dasar besi dan bahan galian industri seperti batu kapur, tanah liat, gypsum, pasir, silica, belerang, barit dan lain-lain. Tetapi dari sumber daya pertambangan tersebut, hanya beberapa mineral yang telah dieksploitasi. Peranan sektor pertambangan dalam ekonomi NTT masih kecil. Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral NTT

masih potensial ditingkatkan. Beberapa komoditas unggulan di bidang pertambangan dan energi adalah minyak bumi, emas, marmer, batu hijau, batu apung, batu hitam, energi panas bumi, energi angin, energi surya dan lain-lain. Informasi mengenai potensi tambang dan teknologi serta manajemen pengelolaan dan pemanfaatan potensi tambang masih kurang. Keterlibatan investor di bidang pertambangan masih rendah. Peraturan daerah belum dapat mendorong iklim investasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi tambang masih rendah.

## **2. Lingkungan Hidup**

Pembangunan lingkungan hidup mencakup pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah atau kawasan sumberdaya alam yang telah rusak untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

- 2.1 Praktek pemanfaatan sumberdaya lingkungan dengan cara merusak (penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan beracun, penebangan liar, penyerobotan kawasan hutan lindung dan lain-lain) masih kerap terjadi, salah satunya oleh lemahnya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan.
- 2.2 Pencemaran terjadi di berbagai aspek dan ruang seperti pencemaran di kawasan pesisir dan pantai, sungai dan tanah, menurun kualitas udara di kawasan perkotaan akibat pencemaran udara, meningkat sampah perkotaan, dan belum tersedianya sistem pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
- 2.3 Hukum lingkungan atau peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup kurang bersinergi dengan peraturan perundangan sektor lainnya, sehingga terjadi inkonsistensi, tumpang tindih dan bahkan saling bertentangan. Salah satu indikannya adalah tumpang tindihnya kawasan lindung dengan kegiatan budidaya yang terlihat dari terjadinya perambahan hutan lindung oleh masyarakat untuk perladangan, adanya pemukiman pada kawasan hutan lindung, kondisi kawasan hutan lindung yang tidak terkonversi menjadi hutan produksi (kawasan budidaya).

- 2.4 Kurangnya kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menangani masalah lingkungan. Hal tersebut diiringi pula oleh melemahnya koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- 2.5 Minimnya data dan informasi mengenai lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah yang rentan dan rawan terhadap bencana lingkungan.
- 2.6 Kesepakatan dan atau isu global mengenai lingkungan hidup kurang diadopsi dalam pembangunan daerah. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan belum diterapkan pada seluruh bidang pembangunan.
- 2.7 Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan belum dilaksanakan semestinya. Penyelamatan ekosistem, flora dan fauna belum sepenuhnya digunakan sebagai bagian integral dalam pembangunan.
- 2.8 Dalam dua puluh tahun ke depan, peningkatan jumlah industri dan kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 2.9 Dalam dua puluh tahun ke depan, peningkatan lahan pertanian untuk meningkatkan daya dukung pangan akan berpotensi mengancam keberadaan hutan, mengganggu keseimbangan tata air, meningkatkan luasan lahan kritis dan mengancam keanekaragaman hayati.
- 2.10 Seiring dengan penetrasi dan akuisisi informasi nasional dan global, dalam dua puluh tahun ke depan diyakini bahwa kesadaran masyarakat akan lingkungan meningkat, sehingga kegiatan ekonomi produksi akan semakin banyak mengalami pergulatan dengan pelestarian dan rehabilitas lingkungan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

### 3. Hutan

Provinsi NTT mempunyai areal kawasan hutan sekitar 1.808.981,21 Ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan yang dapat dikonversi.

- 3.1 Deforestasi dan perburuan liar masih berlangsung sehingga jumlah flora dan fauna yang terancam punah semakin tinggi. Banyak flora dan fauna yang seharusnya dilindungi malah tidak mendapatkan perlindungan karena tidak diketahui statusnya, halmana merupakan dampak dari miskinnya informasi mengenai satwa dan flora langka NTT.
- 3.2 Banyak kawasan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan konservasi (suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata, taman nasional dan lain-lain) dan sistem penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi belum baik.
- 3.3 Kurangnya akses dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kurang berkembang kemitraan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
- 3.4 Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas (berbeda penafsiran perundang-undangan) antara pusat-provinsi-kabupaten/kota.
- 3.5 Dalam 10 tahun terakhir, kebakaran hutan masih terjadi setiap tahun terutama di Kabupaten Alor dan di Sumba Timur.
- 3.6 NTT memiliki sumberdaya hayati kehutanan yang belum dimanfaatkan terutama yang bersifat khas lokal atau endemik. Terkait dengan itu, belum ada upaya pengendalian dan pencegahan introduksi spesies *allien* ke NTT terutama spesies pengganggu
- 3.7 NTT berpeluang meningkatkan sumberdaya kehutanan. Lahan tidur/kritis cukup luas yang potensial didayagunaan menjadi lahan produktif untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan.



#### **4. Lahan Kritis**

- 4.1 Lahan kritis di NTT cukup luas, terutama di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Kupang dan Manggarai. Dalam sepuluh tahun terakhir, luas lahan kritis yang ditangani di NTT sangat sedikit dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada pelita III, luas lahan kritis yang ditangani sekitar 45.811.00 Ha dan pada pelita V seluas 39.082.00 Ha namun pada tahun 1999 hanya 665.00 Ha dan pada tahun 2000 hanya 1.324.00 Ha.
- 4.2 Sebaran lahan kritis belum dipetakan dengan baik, demikian pula publikasi dan informasi mengenai perkembangan dan kondisi lahan kritis minim.
- 4.3 Perilaku ekonomi dan sosial yang berkontribusi pada luasnya lahan kritis di NTT di antaranya adalah:
  - i. Masih berkembang praktek-paraktek pertanian dan penggunaan lahan yang menimbulkan lahan kritis.
  - ii. Masih kurang usaha untuk mencegah dan memulihkan kembali lahan kritis yang sudah rusak seperti penghijauan dan reboisasi yang dipadu dengan upaya pengembangan pertanian, kehutanan dan lain-lain.
  - iii. Masih berkembang sistem perladangan berpindah dengan cara tebas bakar yang mengganggu keseimbangan lingkungan, menghambat pemudaan vegetasi dan mengakibatkan pembentukan lahan kritis.

#### **5. Sumberdaya Air dan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

- 5.1 Dalam 10 tahun terakhir, belum tercapai hasil maksimal dalam identifikasi dan pemetaan sumber air potensial, pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumber air, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber air, dan regulasi pemanfaatan dan pelestarian sumber air.
- 5.2 Infrastruktur pelestarian dan perlindungan sumberdaya air terbatas dan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan air belum berkembang.
- 5.3 Kawasan tangkapan air terutama di bagian hulu kurang terpelihara. Pelestarian dan perlindungan Daerah/Wilayah Aliran Sungai (DAS/WAS) kurang terencana, terarah dan terpadu.

Banyak DAS yang tidak berfungsi optimal. Terjadi Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu DAS menyebabkan menurunnya ketersediaan air dan mengancam turunnya debit dan pasokan air.

- 5.4 Pengelolaan DAS belum terkoordinasi optimal antara hulu dan hilir, padahal konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di DAS terus diperlukan guna menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan.
- 5.5 Ketidakbijaksanaan dalam pemanfaatan sumber air yang tidak memperhatikan kelestarian sumberdaya air bagi produksi pertanian berkelanjutan kerap terjadi sehingga mendegradasi kualitas mata air. Partisipasi masyarakat dalam memulihkan sumber air yang rusak dan dalam melestarikan sumberdaya air perlu diperkuat.
- 5.6 Proyeksi ancaman, NTT akan mengalami kekurangan suplai air, baik untuk kehidupan sehari-hari, irigasi dan kebutuhan ternak jika sumber air dan DAS tidak dipelihara.

## **6. Kawasan Pesisir dan Laut**

Sebagai provinsi kepulauan, sumber daya pesisir dan laut NTT sangat beraneka ragam dan potensial digunakan untuk pengembangan ekonomi NTT. Potensi sumber daya ikan laut dan pengembangan budidaya laut cukup besar sedangkan tingkat pemanfaatan masih rendah. Jenis produksi yang potensial misalnya mutiara, rumput laut, teripang, budidaya tambak, ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, ikan karang, kerang-kerangan dan ikan hias laut. Selain itu, sumber daya pesisir dan laut juga potensial dikembangkan untuk wisata bahari dan serta jasa lingkungan laut lainnya.

- 6.1 Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal terindikasi dari pembangunan yang lebih berorientasi ke darat dan belum mengoptimalkan sumberdaya laut dan pulau-pulau kecil.
- 6.2 Pencurian dan pola penangkapan ikan yang merusak masih berlangsung menyebabkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut tinggi dan banyak flora dan fauna laut yang terancam punah. Indikasinya adalah banyak habitat di kawasan pesisir dan

laut rusak seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun dan lain-lain.

- 6.3 Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut masih rendah.
- 6.4 Perihal batas wilayah laut antara Indonesia dengan Australia di mana Nusa Tenggara Timur menjadi halaman depan Indonesia masih belum diselesaikan dengan tuntas.
- 6.5 Kurang sarana dan prasarana penegakan hukum di laut, jumlah dan kapasitas petugas pengawas, sistim pengawasan dan partisipasi masyarakat dan koordinasi antar instansi masih lemah sehingga pengendalian dan pengawasan belum optimal.
- 6.6 Informasi mengenai wilayah pesisir dan laut masih terbatas karena minimnya riset dan pengembangan teknologi di bidang kelautan, kurangnya teknologi dan manajemen pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut.
- 6.7 Peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut masih kurang serasi antara fungsi konservasi laut dan fungsi ekonominya, karenanya eksploitasi berlebihan serta pola penangkapan ikan yang tidak bersahabat dengan lingkungan menjadikan
- 6.8 Kawasan konservasi laut masih belum berfungsi dengan baik, dan karenanya jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah meningkat.
- 6.9 Sumber daya pesisir dan laut di NTT sangat beraneka ragam, potensi ekonominya cukup tinggi untuk perikanan, pariwisata serta jasa lingkungan lainnya. NTT masih sangat berpeluang meningkatkan produksi perikanan dan kelautan; mengembangkan bahan pangan dan industri SDA pesisir dan laut dan pulau-pulau kecil.

## 2.2 TANTANGAN PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA TIMUR

### A. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

#### 1. Demografi

Apabila tingkat pertumbuhan penduduk berdasarkan data dasar 2004 (2,10%) terus berkembang secara linear maka pada tahun 2020 jumlah penduduk NTT mencapai 7.020.375 jiwa. Pertambahan penduduk tersebut yang lebih diterangkan oleh angka kematian dan kelahiran, kecuali migrasi. Apabila pertambahan penduduk tidak disolusi secara baik maka dalam 20 tahun mendatang akan terjadi tekanan penduduk, sedangkan daya dukung sumberdaya alam terus mengalami penurunan melalui deteorasi terutama sumberdaya alam yang tidak terbarukan. Tekanan penduduk tersebut berdampak negative pada kelestarian sumberdaya alam, lingkungan, kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan melalui varian kemiskinan.

Strategi pengendalian pertumbuhan penduduk lebih ditekankan pada parameter berkontribusi utama yang berkaitan secara runtut yaitu tingkat kesakitan, tingkat kematian (IMR, ASDR dan CDR) dan tingkat kelahiran (ASFR, TFR dan CBR). Jika parameter tersebut dapat diperbaiki secara signifikan maka rasio dependensi dan, jumlah penduduk usia produktif menjadi lebih besar. Peluang perubahan parameter berada pada fungsi kualitas SDM yang diterangkan oleh peran variabel pendidikan.

Persebaran penduduk merupakan persoalan di masa depan manakala terjadi konversi peruntukan lahan produktif menjadi lahan pemukiman, pariwisata dan rekreasi. Persebaran penduduk akan menuai masalah, apabila kepadatan agraris dan teknis tidak disolusi dengan cara memanfaatkan lahan tidur, darat terutama laut selain untuk domisili terutama dalam diversifikasi usaha. Dalam bidang pertanian telah lama terjadi kemiskinan terutama alami dan kualitasnya semakin meningkat jika terjadi peningkatan kepadatan agraris yang berdampak *law of diminishing return*, apalagi produksi dan produktivitas pertanian rendah.

Banyak ruang yang belum dimanfaatkan untuk kepentingan domisili dan sebagai ruang ekonomi/produktif. Terdapat peluang migrasi geografis untuk diversifikasi usaha melalui memanfaatkan ruang hidup baru di subsektor kelautan.

Masalah demografis 2020 adalah bagaimana strategi pengelolaan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dan persebarannya melalui pengendalian faktor determinan utama yaitu tingkat morbiditas yang berkorelasi positif dengan tingkat kematian dan melalui transisi demografi berdampak pada penurunan tingkat kelahiran agar tercapai pertumbuhan yang semakin menurun.

## 2. Pendidikan

2.1. Tantangan aspek pendidikan ditunjukkan oleh kualitas sumberdaya manusia NTT masih rendah berdasarkan parameter HDI/IPM. Rendahnya kualitas SDM diterangkan oleh kualitas pendidikan yang masih rendah yang diukur dari posisi daya saing lulusan SMTA secara nasional, rasio R&D/1 juta penduduk dan jumlah paten yang dihasilkan. Pendidikan NTT belum menghasilkan paten dan ekspor teknologi tinggi/manufaktur maka kualitas SDM NTT berdaya saing rendah pada skala provincial dan nasional. Proporsi penduduk menurut usia dan jenjang pendidikan formal telah mengalami peningkatan secara relative tetapi tetap masih harus ditingkatkan. Angka Partisipasi Murni Pendidikan pada 2005 masih rendah dan dalam waktu 20 tahun kemudian (2020) APM pendidikan dasar baru berubah secara signifikan kecuali pendidikan menengah yang belum tinggi (SMTP 63,06, SMTA 48,33). Terjadi kelambanan peningkatan kualitas SDM, dan daya saing masyarakat NTT, kelambanan perubahan kesejahteraan. Rasio guru : murid, prasarana pendidikan : jumlah penduduk masih kurang.

2.2. Tantangan aspek pendidikan lainnya adalah sekalipun pendidikan dasar merupakan hak tetapi aspek pemerataan belum dipenuhi terutama untuk penduduk margin karena status ekonomi, ketidakadilan gender dan alasan isolasi geografis.

2.3. Pendidikan tetap berpotensi dikembangkan pada semua jenjang dan jenis atas dasar *life long education*. Jika dapat dipercepat

peningkatan mutu pendidikan dan keluarannya diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama SSE (Status Sosial, Ekonomi) akan meningkat maka kualitas kesejahteraan meningkat dan pada gilirannya berdampak positif pada kualitas pendidikan dan keluarannya. Perbaikan prasarana transportasi membuka isolasi geografis yang berdampak positif terhadap pemerataan pendidikan terutama bagi kelompok isolate.

- 2.4. Masalah pendidikan yang perlu disolusi dalam jangka panjang adalah bagaimana meningkatkan sediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan bermutu untuk diperdagunakan dalam proses pembelajaran bermutu untuk menghasilkan keluaran pendidikan bermutu menurut jenis dan jenjang pendidikan. Peningkatan kesejahteraan guru perlu dilakukan. Efek yang diharapkan dari solusi ini adalah peningkatan daya saing masyarakat untuk memasuki persaingan dan membentuk jaringan perubahan pada aras nasional.

### **3. Sumberdaya Manusia**

- 3.1. Tantangan pengembangan sumberdaya manusia berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia. Bahwa kualitas sumberdaya manusia merupakan modal berenergi perubahan yang harus dikelola melalui *life long human development*. Rendahnya mutu sumberdaya manusia akan memicu daya saing bangsa dan dapat membidani dan melestarikan kemiskinan.
- 3.2. Kementakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia cukup terbuka selain karena modal SDM dalam bentuk naluri hakiki manusia yang selalu menginginkan diri dan generasinya yang kemudian dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, juga tersedia berbagai jenis dan jenjang pendidikan sekolah yaitu pendidikan akademik, professional dan vokasional, dan pendidikan luar sekolah. Peningkatan sediaan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin meningkat semakin memperbesar kementakan dimaksud.
- 3.3. Selain itu, transformasi fungsional telah menghasilkan berbagai pekerjaan dan jabatan baru bagi sumberdaya professional berdaya saing. Tantangan terbesar dalam PSDM ke depan adalah kemiskinan dan proses SDM unggul berdaya saing kuat

bereksodus ke sentrum akibat hukum ekonomi pasar. Tantangan yang tidak kalah penting adalah krisis mutu SDM pendidikan akademis S1, dan S2 yang disebabkan oleh penyelenggaraan pendidikan illegal, penjualan gelar akademis yang dimotivasi oleh aktualisasi diri khususnya pemenuhan kebutuhan prestise. Pada sisi lain belum tersedia perangkat hukum positif pada tataran praksis untuk mengatur penyimpangan tersebut.

- 3.4. Masalahnya bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk memperoleh daya saing dalam kerangka peningkatan kualitas hidup. Perubahan sikap mental untuk memilih keutamaan prestasi bukan prestise akan mendorong terbentuknya SDM professional. Penyehatan iklim dan kondisi dunia usaha termasuk kepastian dan stabilitas politik dan keamanan dapat menjadi daya tarik bagi SDM berdaya saing tinggi untuk reeksodus dari sentrum ke perifer.

#### **4. Kesehatan**

- 4.1. Kemiskinan dalam arti luas termasuk kemampuan ekonomi, kualitas lingkungan, dan pendidikan yang rendah menerangkan kualitas kesehatan masyarakat. Tingkat morbiditas karena penyakit infeksi dan pernapasan masih tinggi, angka kematian juga masih tinggi, demikian pula penduduk berstatus gizi buruk. Bahwa rasio dokter:penduduk; paramedia : penduduk rumah sakit : penduduk dan sarana kesehatan lainnya masih belum baik tetapi tetap berpeluang untuk mengalami perbaikan setiap tahun. Perubahan pendidikan dan kualitas SDM mudah-mudahan lebih cepat dari angka proyeksi 2020 akan mendorong percepatan perbaikan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan keefektifan layanan kesehatan.
- 4.2. Pembangunan jangka panjang memerlukan program percepatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pengendalian variable-variabel antedecedern seperti kemiskinan, pendidikan dan mutu sumberdaya termasuk pendayagunaan perempuan sebagai kekuatan perubahan menuju masyarakat NTT yang sehat.

## **5. Pemberdayaan Perempuan**

- 5.1. Tantangan dalam pemberdayaan perempuan adalah status subordinasi perempuan di bawah superordinasi laki-laki termasuk dalam domain perempuan diperdasaan, masih sangat kuat. Pendidikan belum berhasil secara signifikan mendorong percepatan perubahan ideology gender untuk perubahan status perempuan. Dampak ketidak setaraan tersebut adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Perempuan belum berakses sama dengan laki-laki untuk mengikuti pendidikan formal karena preferensi laki-laki. Tantangan internal kelompok perempuan adalah relative merasa aman dengan posisi subordinasi dan status ketenagakerjaan bukan sebagai angkatan kerja, tetapi hanya sebagai penerima pendapatan suami. Preferensi laki-laki masih mengekang perempuan mengaktualisasi diri melalui perdayagunaan modal SDM.
- 5.2. Komposisi penduduk menurut seks menunjukkan wanita sedikit lebih banyak dari lelaki, tetapi distribusi tenaga kerja wanita diberbagai sektor terutama sektor politik masih sangat rendah . Ada peluang yang terbuka untuk aktualisasi status dan peran perempuan yaitu potensi sumberdaya perempuan secara populatif dan berbagai rules dan regulasi yang telah dilegalkan dalam kerangka pemberdayaan perempuan.

## **6. Pembangunan Budaya**

- 6.1. Benturan budaya dan antar pelaku budaya masih cukup terasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat di Nusa Tenggara Timur. Perbedaan nilai dan norma budaya dalam kemasam sistem kultural masih salah difungsikan sebagai pemicu fanatisme. Benturan dan friksi akan menguras energi pembangunan melalui persaingan yang menekan motivasi bersaing. Mestinya kemajemukan dan perbedaan dapat digunakan sebagai factor kekuatan menginstitutionalisasi persatuan.
- 6.2. Masalah yang dihadapi oleh pembangunan masa depan NTT adalah bagaimana mensinergikan modal sosial budaya, yaitu kepelbagaian, solidaritas mekanistik, komunalisme, kohesi sosial, jaringan sosial budaya dan interaksi budaya untuk menghasilkan energi penguatan dan pengembangan budaya agar eksis dalam



perubahan untuk menghilangkan alienasi budaya yang berdampak negative dalam bentuk komunitas global dan budaya global yang mereduksi jatidiri bangsa.

- 6.3. Bagaimana mempertahankan jatidiri bangsa dari terpaan globalisasi telekomunikasi dan informasi agar walaupun masyarakat wilayah ini masuk dalam interaksi kehidupan global tetapi tetap memiliki identitas ke Indonesiaan. Bangsa ini tidak perlu menjadi asing di negerinya sendiri atau sebagai tamu di rumahnya hanya karena mengadopsi identitas global karena ingin menjadi manusia global.
- 6.4. Bagaimana merubah kekeliruan asumsi bahwa peran budaya bersifat indeterministik karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan gagasan factor lain. Karena itu budaya harus digunakan sebagai salah satu kekuatan perubahan, ini masalah pembangunan aspek budaya ke depan.

## **B. Bidang Ekonomi**

1. Pembangunan perekonomian belum terintegrasi dengan baik terlihat dari tidak terdorongnya kemajuan industri sekalipun aktifitas meningkat relatif terhadap pendapatan domestik. Tantangan pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur adalah bagaimana mengintegrasikan secara spiralis pembangunan pada sektor primer, sekunder dan tersier sehingga pertumbuhan sektor primer mendorong pertumbuhan sektor sekunder, dan bersama-sama keduanya mendorong sektor tersier.
2. Dalam aspek pengembangan kebijakan revitalisasi pertanian, tantangan pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengejawantahkan kebijakan pembangunan nasional dalam revitalisasi pertanian melalui pembangunan pertanian spesifik wilayah yang sesuai dengan potensi semiarid dan kelautan Nusa Tenggara Timur serta aspek sosial budayanya.
3. Dalam aspek perilaku ekonomi, pergulatan antara kepentingan pembangunan ekonomi modern dengan kepentingan mempertahankan eksistensi suku bangsa di Nusa Tenggara Timur masih akan terus menjadi tantangan yang berat. Upaya-upaya

masa depan dalam mendorong pergeseran perilaku produksi, investasi, menabung dan konsumsi ke arah yang lebih memungkinkan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah-tengah masyarakat memerlukan strategi berwawasan ekologi manusia sehingga terjadi keselarasan ke arah yang positif.

4. Rendahnya pendapatan per kapita dan senjangnya pendapatan antar kelompok masyarakat merupakan akumulasi dari perilaku sosial ekonomi selama dasawarsa terakhir. Jika tidak ada intervensi yang mendorong perilaku ke arah investasi kapital dan curahan kerja yang lebih efisien, kemiskinan akan lestari.
5. Pada aspek ketenagakerjaan, 63% pekerja di NTT bekerja <15 jam/minggu, dan hanya 15% pekerja bekerja >41 jam, (BPS, 2002). Ada indikasi bahwa curahan kerja tersingkat dikontribusikan oleh aktivitas pertanian di mana 82% pekerjanya tergolong miskin. Dari aspek dinamisnya, 85% kepala keluarga keluarga miskin berpendidikan sebatas SD, hal mana menjadi inhibitor adopsi lompatan teknologi dan manajemen pertanian lahan kering.
6. Tantangan aspek ketenagakerjaan adalah bagaimana menciptakan angkatan terampil bermotivasi kerja tinggi yang pada gilirannya mencurahkan waktu, daya dan inovasi bagi penciptaan produksi bernilai tinggi yang cukup untuk memutus mata rantai kemiskinan.
7. Jika investasi pada bidang pendidikan SDM serta investasi IPTEK tidak dilaksanakan dengan bijaksana dan berkelanjutan, kualitas SDM dan sumberdaya teknologi akan menurun, terbentuk rantai kemiskinan yang makin kuat yang pada gilirannya memposisikan penduduk berusia produktif sebagai beban pembangunan.
8. Pada aspek kapital, rendahnya ketersediaan dan keteraksesan terhadap lembaga keuangan telah menghambat upaya pencapaian skala usaha ekonomis. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengakselerasikan ketersediaan lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat yang memungkinkan ketersediaan lembaga keuangan di pedesaan.
9. Tantangan keteraksesan perbankan bukan hanya oleh jarang tersedianya lembaga tersebut namun juga karena tingginya suku bunga kredit yang ditawarkan (sampai 99% per tahun) relatif

kepada pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur (<10% per tahun). Solusi ke depannya adalah pada penciptaan sistem perkreditan yang memungkinkan peranan perbankan sebagai lembaga intermedia yang pro investasi.

10. Pada aspek SDA, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memposisikan kondisi semiarid Nusa Tenggara Timur sebagai potensi dan bukannya kendala semata. Secara simultan dengan pembangunan aspek ketenagakerjaan dan kapital, keunikan semiarid Nusa Tenggara Timur tersebut harus menjadi alat sortasi kebijakan pembangunan pertanian spesifik wilayah.
11. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengejawantahkan potensi sumberdaya pesisir pantai dan kelautan ke dalam aktifitas ekonomi produktif sehingga terjadi optimalisasi penggunaan sumberdaya pesisir pantai dan kelautan.
12. Terkait dengan bahan tambang bernilai tinggi, tantangan ke depan adalah bagaimana mengakselerasikan pertumbuhan aktifitas pertambangan yang telah diinisiasi dalam dasawarsa terakhir sehingga optimalisasi ekplorasi dan eksploitasi deposit tersebut.
13. Pada aspek teknologi, tantangan 20 tahun ke depan adalah bagaimana mengembangkan sistem mekanisasi perdesaan dimana aktifitas-aktifitas produksi di pedesaan sudah harus bergeser dari sistem manual semata ke sistem yang lebih mekanik. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan ketersediaan dan keteraksesan energi yang memadai. Dalam kaitan dengan ketersediaan enegri, penyediaan bahan bakar nabati menggunakan minyak jarak, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit perlu terus dikembangkan dan diimpelemtasikan sehingga secara bertahap perdesaan di Nusa Tenggara Timur menikmati manfaat mekanisasi.

### **C. Bidang Sarana dan Prasarana**

1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat di NTT dapat dioptimasi dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan; perbaikan sistim/management pelaksanaan proyek; mempertajam skala prioritas pembangunan; meningkatkan keterlibatan masyarakat dan penciptaan sumber dana baru. Tantangan adalah wilayah NTT mempunyai topografi

berbukit, tingkat kelerengan curam sehingga secara umum prasarana jalan dan jembatan rawan longsor, erosi kecelakaan lalu lintas dan bencana alam lainnya. Selain itu, akses transportasi darat dari desa ke kota banyak berada di wilayah medan yang sulit.

2. Peranan transportasi laut dalam perekonomian NTT diperkirakan akan semakin penting 20 tahun mendatang. Terutama dalam mendukung mobilitas barang antar pulau, provinsi dan eksport-import. Hal ini sesuai dengan posisi geografi NTT sebagai provinsi kepulauan dan dekat dengan beberapa negara tetangga. Peluang yang dapat dikembangkan dimasa mendatang adalah meningkatkan transportasi laut dari beberapa wilayah di NTT ke beberapa wilayah di Timor Leste dan Australia untuk meningkatkan volume perdagangan. Membuka jalur transportasi laut dari beberapa wilayah di NTT dengan beberapa wilayah di Australia untuk mendukung eksport terutama hasil-hasil pertanian. Proyeksi ancaman adalah kecelakaan laut seperti kebakaran, masalah cuaca dan keamanan. Perubahan iklim global dapat menyebabkan terjadinya perubahan cuaca yang kadang sulit diprediksi dan diperkirakan dapat mempengaruhi efektifitas dan keamanan transportasi laut. Selain itu, rawan keamanan dan perdagangan ilegal terutama di wilayah perbatasan laut dengan negara tetangga terdekat khususnya Timor Leste.
3. Peranan transportasi udara dalam perekonomian NTT diperkirakan semakin penting dalam 20 tahun mendatang, terutama dalam mendukung eksport-import dan pariwisata. Hal ini sesuai dengan posisi geografi NTT yang dekat dengan Timor Leste dan Australia; perairan pesisir dan laut serta budaya NTT potensial dalam pariwisata serta posisi NTT yang dekat dengan Pulau Bali. Sejumlah bandara udara di NTT diperkirakan potensial berkembang menjadi bandara udara Internasional. Jalur penerbangan ke Timor Leste dan ke beberapa negara bagian di Australia sangat potensial dikembangkan. Peranan transportasi udara dalam angkutan barang, khususnya yang bernilai ekonomi tinggi diperkirakan akan meningkat terutama ke Indonesia bagian barat dan ke beberapa negara tetangga. Tantangan adalah transportasi udara secara umum rawan kecelakaan karena sebagian besar bandara berada/dekat perbukitan; sarana dan prasarana bandara masih minim dan seringnya terjadi perubahan cuaca. Selain itu, juga rawan akan

pelanggaran batas udara karena posisi NTT yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga.

4. NTT berpeluang meningkatkan akses terhadap air bersih; pasokan air, dan meningkatkan jumlah penduduk mendapat layanan air minum perpipaan. Masih terdapat sumber-sumber air yang belum dikembangkan. Sumber daya air yang ada masih potensial dikembangkan produktifitasnya, seperti peningkatan debit air dengan cara konservasi. Efisiensi pemanfaatan air potensial ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dan badan usaha lainnya dalam penyediaan air bersih masih dapat ditingkatkan. Provinsi NTT sangat berpeluang untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi. Kondisi NTT saat ini belum mengalami kendala yang signifikan dalam masalah sanitasi dan persampahan, sehingga masih relatif mudah dalam perencanaan pengelolaan. Proyeksi ancaman adalah, jika konservasi tidak dilakukan, NTT berpotensi rawan akan krisis air. NTT merupakan wilayah yang tergolong kering dimana hanya 4 bulan keadaan relatif basah sedang 8 bulan relatif kering. Banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan harganya belum terjangkau dapat memicu masyarakat mengkonsumsi air yang tidak higienes. Hal ini dapat memicu berbagai jenis penyakit dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Selain itu, kurangnya ketersediaan air dapat mengurangi minat investor menanam modal.
5. Produksi pertanian cukup potensial dikembangkan dengan meningkatkan luas lahan beririgasi dengan memanfaatkan sumberdaya air yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan bendungan, embung dan sarana dan prasarana irigasi lainnya pada berbagai lahan kering potensial. Jumlah lahan tidur dan lahan kritis yang potensial diubah menjadi lahan produktif masih cukup besar. Proyeksi ancaman adalah, jika usaha peningkatan produksi hasil pertanian melalui peningkatan luas lahan beririgasi gagal dapat menyebabkan kekurangan pangan dan gizi masyarakat. Selain itu, dapat menyebabkan banyak pengangguran di pedesaan.
6. Provinsi NTT berpeluang meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik terutama non-BBM melalui penciptaan dan peningkatan kontribusi energi nabati, biogas, biomassa, energi matahari, arus laut dan tenaga angin guna memenuhi kebutuhan energi listrik terutama di

pedesaan. Jika energi listrik tidak dapat ditingkatkan akan terjadi defisit tenaga listrik, hal mana akan melambatkan laju pembangunan.

7. NTT perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peningkatan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Kegagalan dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan akan menyebabkan minimnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas SDM.
8. Peningkatan kepemilikan rumah dan fasilitas pemukiman dapat dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan rumah dan melibatkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam pendanaan. Kegagalan pembangunan di bidang pemukiman akan menyebabkan banyak penduduk tidak memiliki rumah, terjadinya pemukiman kumuh terutama di perkotaan dan rendahnya kualitas pemukiman di kawasan pesisir dan pantai dan pedesaan.
9. Dalam 20 tahun mendatang diperkirakan pemanfaatan telekomunikasi, teknologi informasi, penyiaran dan lain-lain akan meningkat pesat. Akses informasi ke seluruh pelosok NTT dan akses ke wilayah nasional dan Internasional akan meningkat. Investasi dalam penyediaan infrastruktur telematika terutama swasta di NTT diperkirakan akan meningkat. Karena saat ini masih terdapat sejumlah wilayah potensial di NTT yang belum dikembangkan dan cukup menarik dalam investasi. Selain itu, akibat berkembangnya perekonomian di NTT, kebutuhan akan teknologi telekomunikasi dan telematika juga meningkat. Akan terjadi perubahan yang terkait dengan masalah keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi. Selain itu, akan meningkat kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dan telematika.

#### **D. Bidang Politik dan Pemerintahan**

1. Diperkirakan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, nilai-nilai sosial budaya yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan masyarakat di NTT akan mengalami degradasi karena tergeser oleh peradaban baru yang bersifat universal, dan oleh menguatnya liberalisme ekonomi dan individualisme.

2. Harapan terhadap sistem politik demokratis yang akan membawa perubahan kearah kehidupan yang lebih tertib, aman, adil, transparan, bertanggungjawab, dan sejahtera dapat menjadi ancaman bila hal tersebut tidak terjadi. Masyarakat akan berpaling kembali kepada sistem politik yang otoriter karena dipandang lebih memberikan rasa aman dan nyaman.
3. Isyarat terhadap otonomi daerah yang berlaku di negara kita adalah bahwa melalui otonomi daerah, masyarakat akan menjadi lebih sejahtera, namun bila hal tersebut tidak terjadi; maka diduga akan menjadi ancaman yang serius bagi otonomi daerah itu sendiri. Salah satu ancaman serius yang sudah dapat dipastikan ialah kembali berlakunya sistem sentralistik.
4. Kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah yang kurang profesional dapat mengancam pencapaian good and clean governance, kewibawaan pemerintah, dan pada gilirannya akan mereduksi semangat partisipasi pembangunan dari masyarakat.
5. Diduga terbatasnya anggaran pemerintah daerah menjadi ancaman bagi DPRD untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam rangka mengajukan rancangan peraturan daerah.
6. Hambatan - hambatan sosial budaya merupakan ancaman bagi kaum perempuan untuk aktif dalam bidang politik serta dipercaya menduduki jabatan - jabatan politik dan publik, disamping kesiapan sumber daya perempuan yang relatif masih terbatas.
7. Sebagai propinsi kepulauan sediaan dan kualitas sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi antar pulau merupakan prasyarat utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam rangka pelayanan publik. Pemenuhan terhadap tuntutan ini tentu menjadi beban pemerintah pusat dan daerah. Karena itu perlu dijalin kemitraan dengan pihak swasta atas dasar saling menguntungkan dengan didasarkan pada regulasi-regulasi yang jelas dan transparan akan sangat mendukung terpenuhinya pelayanan publik yang baik. Hanya dengan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi yang memadai akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas sosial, komunikasi politik, budaya, serta hubungan antar manusia. Sampai

saat ini sarana dan prasarana transportasi tersebut belum memadai.

8. Tergesernya nilai - nilai budaya lokal oleh peradaban baru yang bersifat universal perlu diantisipasi sejak dini, karena berpotensi melahirkan konflik horizontal yang berlabel sara. Konflik yang terjadi diperkirakan dapat merenggangkan hubungan-hubungan sosio kultural yang telah melembaga sementara nilai-nilai baru yang diharapkan berperan membimbing sikap dan perilaku masyarakat sedang berproses ke arah tersebut.
9. Tumbuhnya demokrasi berkaitan erat dengan : tingkat kesejahteraan penduduk yang makin baik, mobilitas sosial yang tinggi, budaya politik yang partisipan, serta political will yang besar dan kuat dari semua elemen masyarakat, pemerintah dan swasta. Hingga saat ini, elemen-elemen penting tersebut belum tumbuh dan berkembang secara baik.
10. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah membuat ketergantungan yang sangat tinggi dengan pemerintah menjadi sulit dilepaskan. Alhasilnya otonomi daerah tidak lebih daripada sebuah cita-cita politik ketimbang menjadi sebuah kenyataan.
11. Kemauan kaum perempuan untuk terlibat dalam dunia politik cukup tinggi, namun kemauan tersebut belum cukup kuat untuk menggeser pandangan sosial budaya masyarakat terhadap posisi perempuan dalam struktur sosial. Alhasilnya target 30 persen untuk diposisikan dalam lembaga - lembaga politik relatif masih sulit terpenuhi.
12. Harapan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik dan pemerintahan untuk mengakomodir tuntutan-tuntutan mereka cukup tinggi, namun hal tersebut belum didukung oleh kemampuan kelembagaan yang memadai.
13. Perampingan struktur birokrasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di provinsi NTT antara lain karena terkait erat dengan orientasi aparatur birokrasi pada jabatan struktural masih cukup kuat ketimbang jabatan fungsional.



14. Profesionalisme, kualitas dan kompetensi SDM aparatur birokrasi pemerintah provinsi belum dioptimalkan secara penuh.

#### **E. Bidang Hukum dan HAM**

1. Tantangan dalam bidang hukum adalah bagaimana mewujudkan sistem hukum (struktur, substansi dan kultur) yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan terwujudnya HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. Soal pertama yang mesti diselesaikan adalah penentuan definisi operasional dari keadilan dan kebenaran yang dijadikan orientasi sikap dimaksud. Keadilan dan atau ketidakadilan hukum dapat terjadi pada dua aras yaitu substansi dan prosedur. Keadilan memiliki dua batas, yaitu batas dalam pada aplikasi asas legalitas dan batas luar pada respons atas kepentingan umum. Pandangan paling mutakhir tentang kebenaran secara eksplisit meragukan adanya kebenaran absolute; yang ada adalah cara-cara yang berbeda untuk mengungkapkan kebenaran.
2. Tantangan dalam bidang HAM adalah bagaimana merancang strategi yang jelas guna meredam masalah tersebut, yang tentunya didukung oleh riset-riset yang yang disempurnakan terus menerus dalam rangka menemukan respons-respons hukum dan non hukum yang efektif. Tanggapan seketika tak banyak artinya dibandingkan dengan strategi jangka panjang untuk mengeliminasi factor-faktor penyebab munculnya gejala dimaksud. Modal dasar untuk itu tersedia melimpah: SDM di kalangan akademis, politisi, penegak hukum dan LSM di NTT.

#### **F. Bidang Geomorfologis, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**

Jika permasalahan yang terkait dengan SDA dan lingkungan hidup di NTT tidak diselesaikan secara bijaksana, diperkirakan akan memicu krisis pangan, air dan energi. Hal ini diterangkan oleh pemikiran berikut:

1. Pada 20 tahun ke depan, akibat penambahan penduduk, kebutuhan pangan, papan dan sandang akan meningkat. Hal ini akan menuntut peningkatan lahan pertanian, meningkat deforetrasi yang dapat mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air dan ketersediaan air.

2. Pada 20 tahun ke depan, akan meningkat jumlah industri dan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan pencemaran air, tanah dan udara. Meningkat penggunaan bahan B3. Di perkotaan, akan terjadi perumahan kumuh akibat tekonsentrasinya penduduk, meningkat sampah perkotaan dan polusi udara.
3. Pola produksi yang terlalu berorientasi pada efisiensi ekonomi jangka pendek berpotensi memutuskan rantai produksi karena pemanfaatan keanekaragaman hayati yang melebihi daya dukung sumberdaya berkelanjutannya.
4. Akibat deforestasi dan mengecilnya luasan hutan baik secara agregat maupun hutan produksi, dalam dua puluh tahun ke depan, NTT akan mengalami kekurangan produksi kayu, sehingga kayu akan menjadi komoditas yang makin mahal.
5. NTT dapat mengalami kekurangan air baik untuk kehidupan sehari-hari, irigasi maupun untuk peternakan karena terus berlangsungnya pengrusakan dan pemanfaatan sumber air secara tidak bertanggung jawab, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya air rendah dan pemulihan sumber air yang rusak.
6. Keberlangsungan perusakan sumber daya pesisir dan laut yang disertai dengan peningkatan kelangkaan dan keterancampunahan biota laut akan terus marak.
7. Pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah pesisir, laut, perairan tawar dan pulau-pulau kecil berpotensi untuk meningkat.
8. Posisi NTT sangat strategis dari aspek ekonomi dan geopolitik, berbatasan dengan Australia dan Timor Leste hal mana berpeluang menjalin kerja sama regional dan internasional. Namun demikian meningkatnya konflik batas laut dengan Australia akan menempatkan NTT pada posisi yang memiliki daya tawar lebih rendah.
9. NTT memiliki berbagai macam deposit, baik mineral maupun sumber energi lainnya yang potensial untuk dieksplorasi dan dieksploitasi.

10. NTT memiliki keanekaragaman hayati yang belum dimanfaatkan. NTT berpeluang memperoleh manfaat dari kekayaan keanekaragaman hayati termasuk jasa lingkungan pesisir dan pantai karena NTT merupakan provinsi kepulauan dengan kawasan pesisir dan pantai yang sangat luas.
11. NTT berpeluang meningkatkan ekonomi dari sumberdaya kehutanan. Lahan tidur/kritis yang belum dikelola cukup besar yang potensial dikembangkan menjadi lahan produktif untuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan.